



Penyusunan Dokumen Perencanaan RPJMD



Kursus Perencanaan Pembangunan Daerah Angkatan XIV
LPEM-FEUI Jakarta, 9 Juni 2015





Dadang Solihin

Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Senior Strategic Planner pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pernah menjadi Direktur selama 7 tahun di Bappenas, Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll.

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 LAN-RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI yang dinyatakan lulus dengan pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha.

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email
dadangsol@gmail.com HP 08129322202 web:
<http://dadang-solihin.blogspot.com>

Materi

- Perencanaan Pembangunan Daerah
- Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah
- Penyusunan RPJMD
- Perumusan Visi-Misi
- Perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019
- Perangkat Pelaksanaan Penyelarasan
- Simulasi Penyelarasan RPJMD-RPJMN: Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Jawa Barat



Perencanaan Pembangunan Daerah

Proses Perencanaan



Pendekatan Politik:

Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*public choice theory of planning*), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.



Proses Teknokratik:

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.



Partisipatif:

Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, antara lain melalui Musrenbang.



Proses top-down dan bottom-up:

Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)

NASIONAL		DAERAH	
Dokumen	Penetapan	Dokumen	Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional)	UU (Ps. 13 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)	Perda (Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional)	Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)	Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2)	Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1)	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 21 Ayat 3)

Syarat Dokumen Perencanaan

S.M.A.R.T

- 1. Specific:** Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
- 2. Measurable:** Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator kuantitatif maupun kualitatif;
- 3. Achievable:** Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
- 4. Relevant:** Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target *output* dalam rangka mencapai target *outcome* yang ditetapkan; serta antara target *outcome* dalam rangka mencapai target *impact* yang ditetapkan;
- 5. Time Bond:** Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.

Syarat Perencanaan

Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:

1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Fungsi/Manfaat Perencanaan

- Sebagai penuntun arah
- Minimalisasi ketidakpastian
- Minimalisasi inefisiensi sumberdaya
- Penetapan standar dan pengawasan kualitas





Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah



Apa Itu Pembangunan?

Pembangunan adalah:

- proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik
- melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Tujuan Pembangunan:

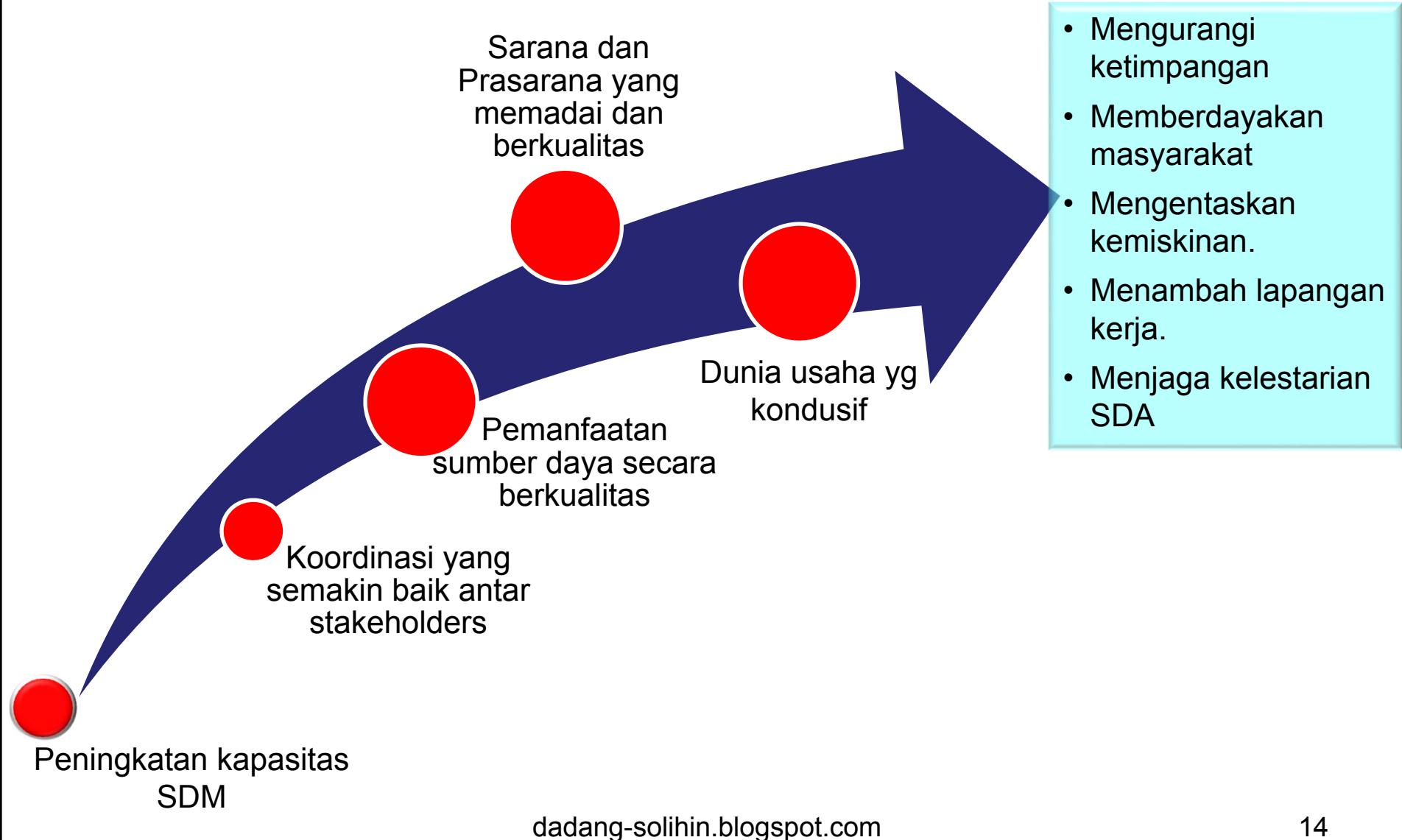
1. **Peningkatan standar hidup (*levels of living*)** setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan **tumbuhnya rasa percaya diri (*self-esteem*)** setiap orang.
3. **Peningkatan kebebasan (*freedom/democracy*)** setiap orang.

Todaro, 2000

How?

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 - antar daerah
 - antar sub daerah
 - antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

Tantangan dalam Pembangunan Daerah



PEMBANGUNAN DAERAH



PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu kemampuan yang **andal** dan **profesional** dalam:

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat,
- Mengelola sumber daya ekonomi daerah.

Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:

- Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,
- Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

PEMBANGUNAN DAERAH

Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi
Daerah

Pengelolaan
Sumberdaya

Good Governance

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Pemerintahan

Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain.

Dunia Usaha

Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan.

Masyarakat

Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.

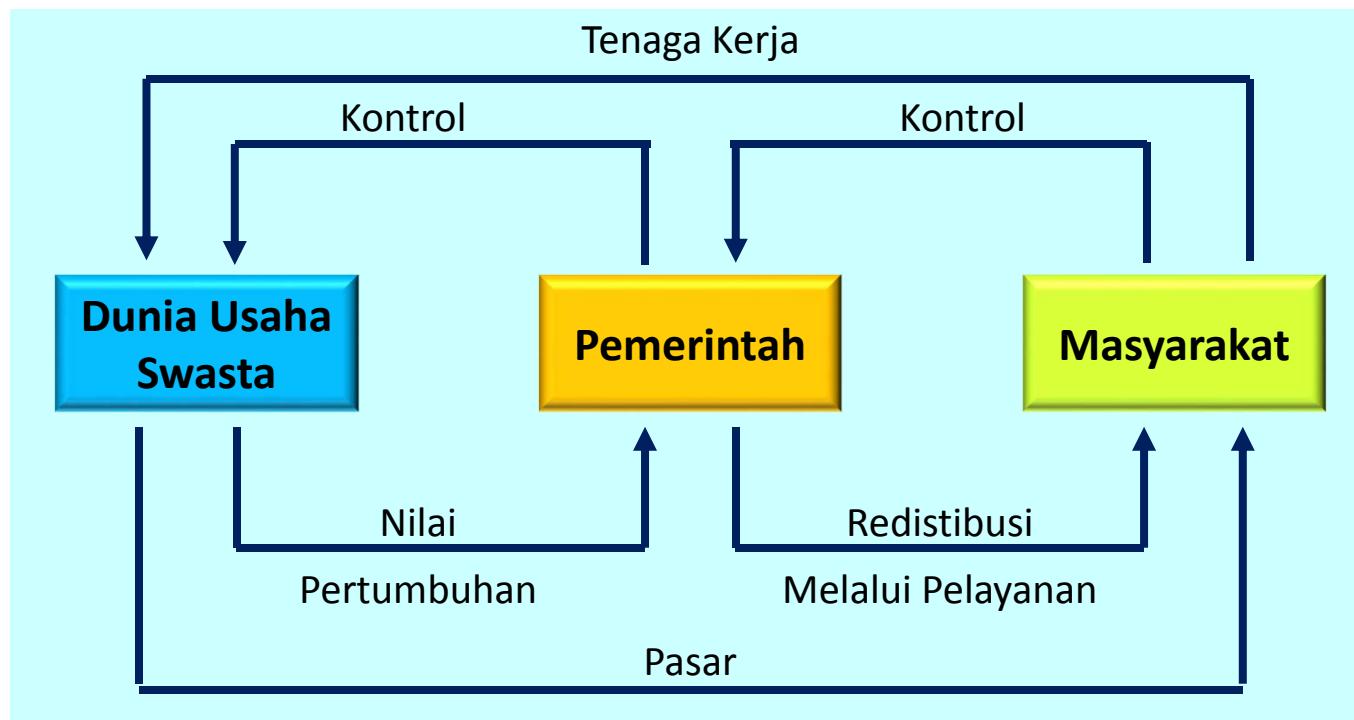
Pergeseran Paradigma: *From Government to Governance*



Government	Governance
<ul style="list-style-type: none">▪ Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,▪ Aktor di luaranya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.	<ul style="list-style-type: none">▪ Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, <i>civil society</i> dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

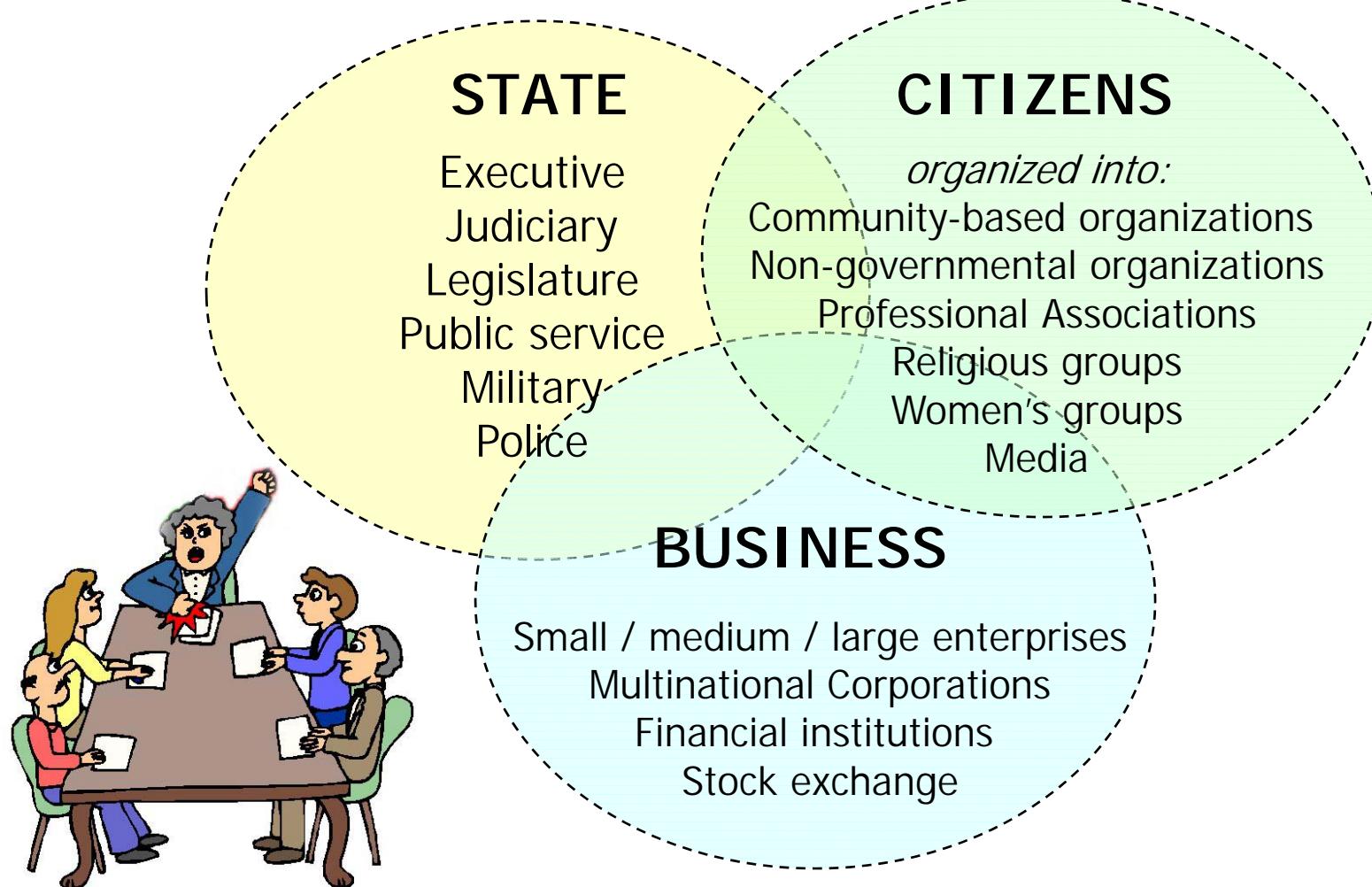
Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance

- Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.



- Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka **Governance** akan **Good**.

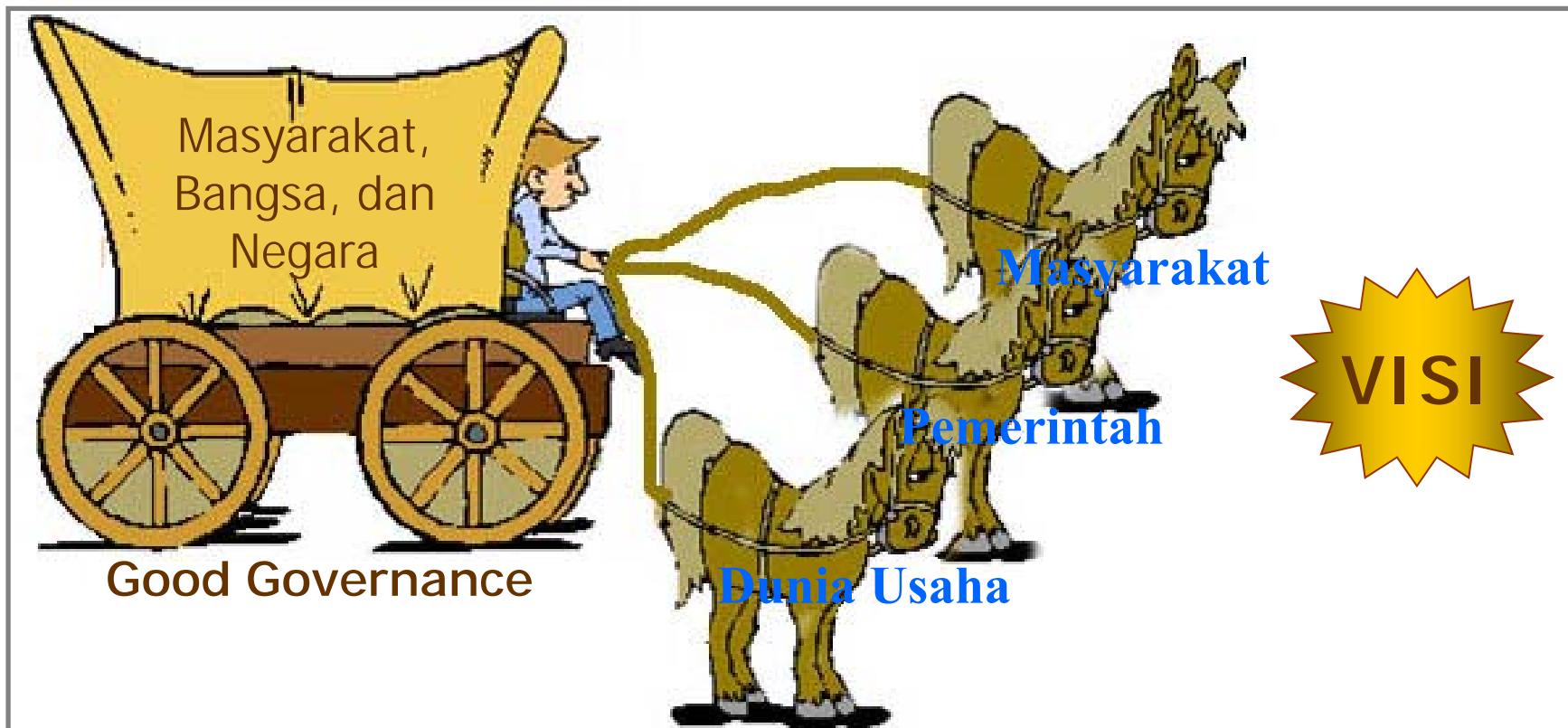
Pelaku Pembangunan: Stakeholders



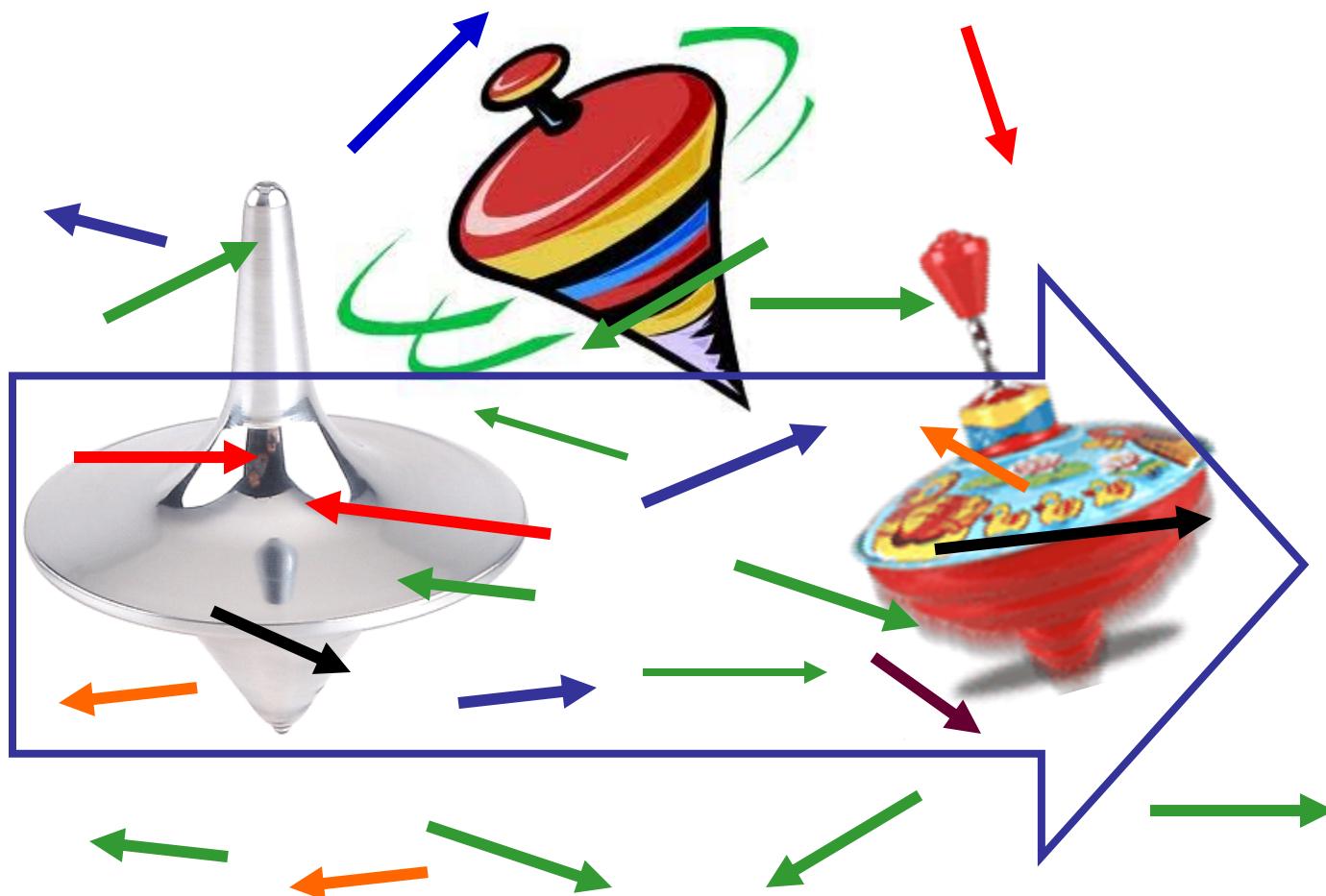
Troika



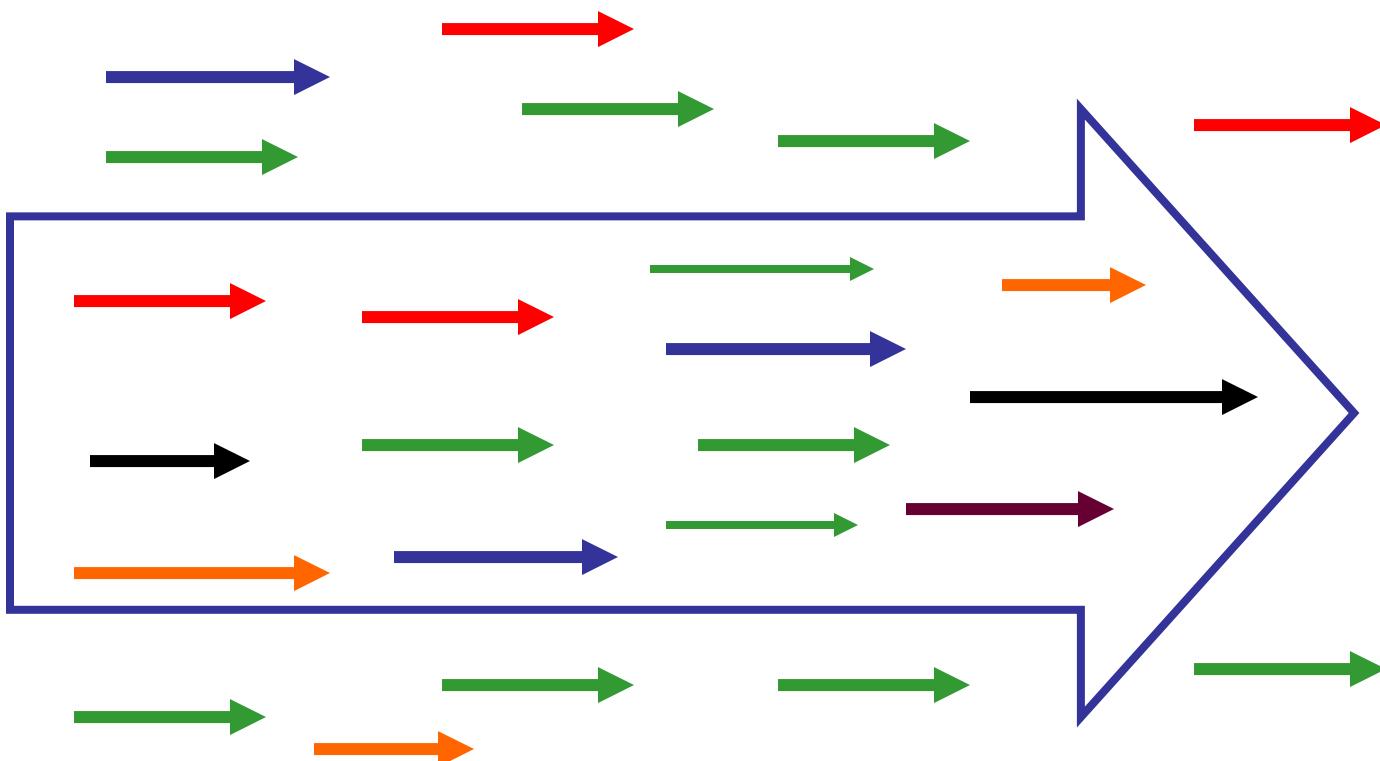
Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



Sinergitas Stakeholders



Sinergitas Stakeholders



Penyusunan RPJMD



Apa itu RPJMD

- RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepertutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada:
 1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

Apa itu RPJMD

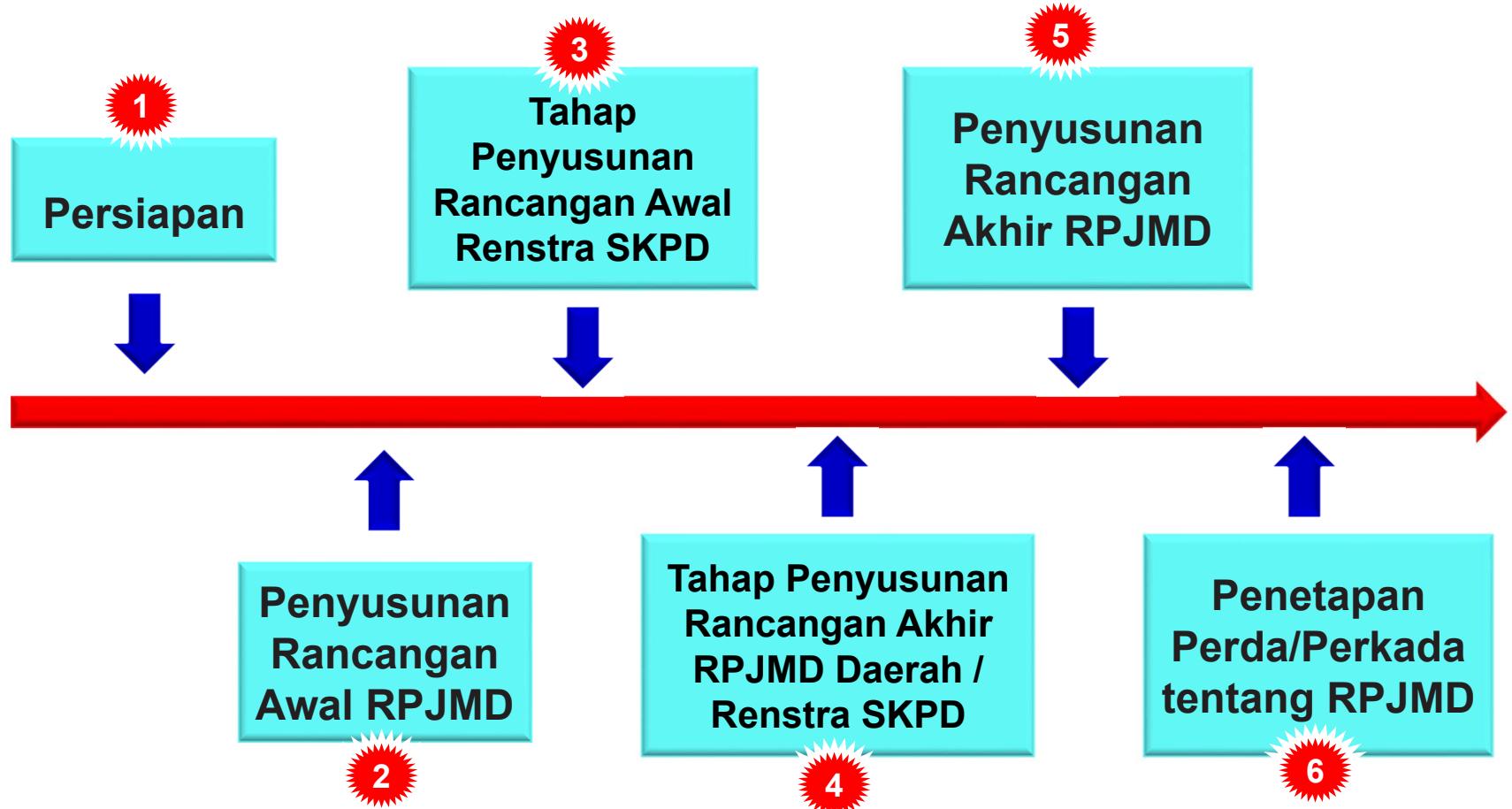
RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:

1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Substansi RPJMD

- RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
- kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
- yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
- kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan.

Step by Step Penyusunan RPJMD



Tahap Persiapan

1. Orientasi Perencanaan Daerah
2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
5. Orientasi Renstra SKPD
6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
8. Identifikasi Stakeholder
9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD

Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 tahunan
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
3. Kajian terhadap RPJMD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
10. FGDs untuk setiap Topik
11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD

Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD

1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah
3. Tupoksi SKPD
4. Perumusan Visi dan Misi RPJMD
5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahannya)
9. Pembahasan Forum SKPD
10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
12. Musrenbang RPJMD
13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD

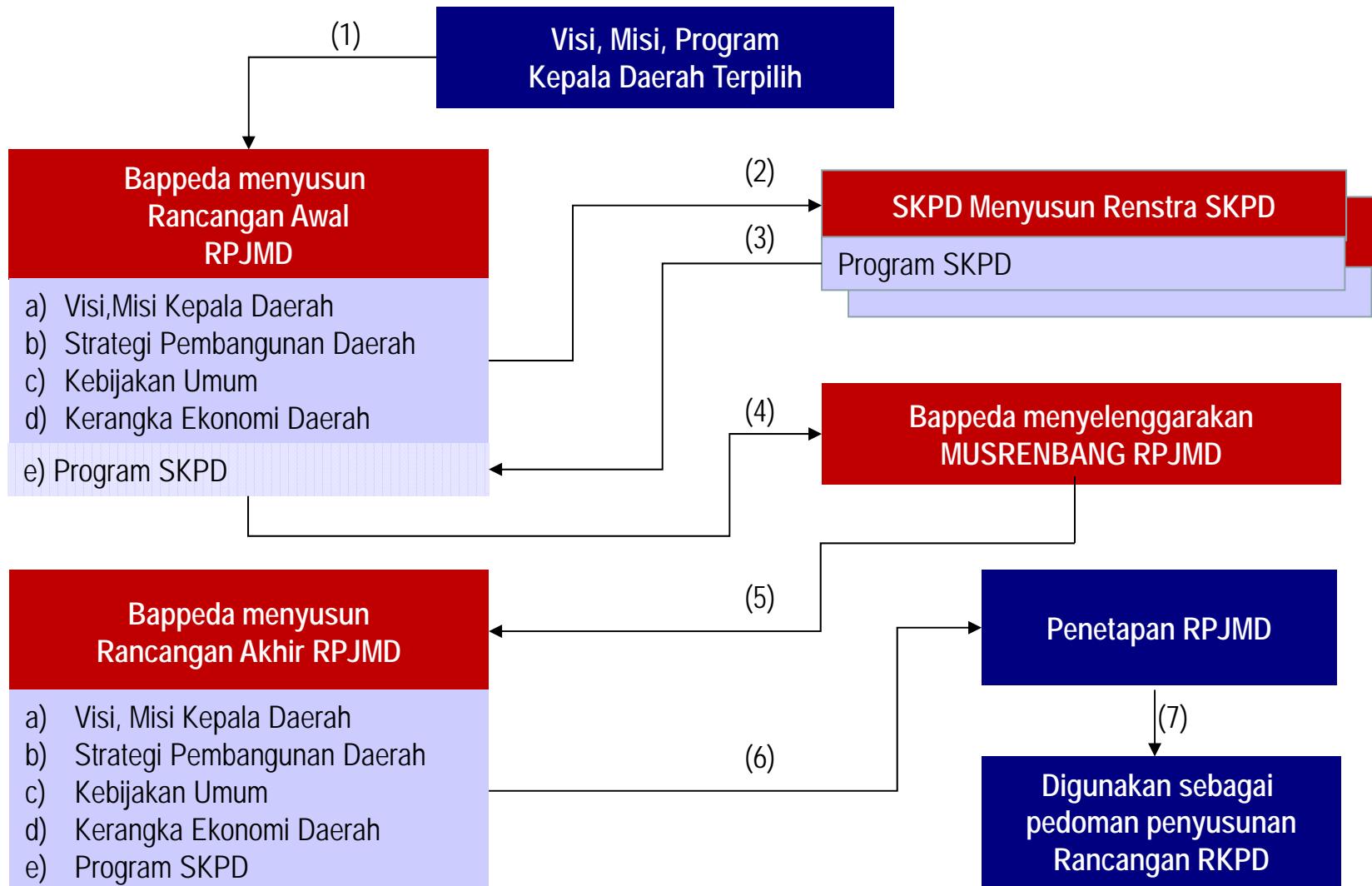
Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra SKPD

1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD

Tahap Penetapan Perda/Perkada tentang RPJMD

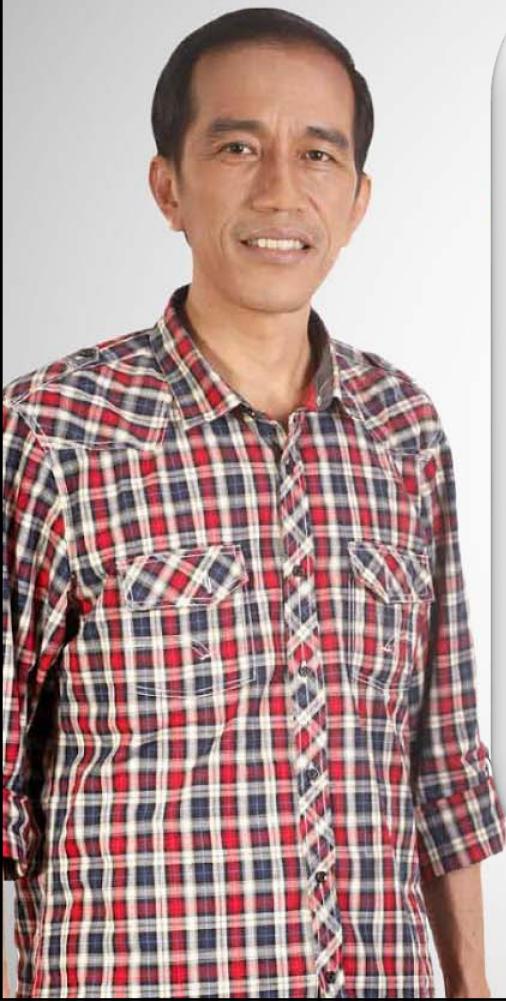
1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada Bupati cq Bappeda Kabupaten
2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten
3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
5. Penetapan Ranperda menjadi Perda
6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan

Langkah Penyusunan RPJMD





Janji Jokowi – Ahok 2012-2017



1. Revitalisasi Pemukiman Padat dan Kumuh
2. Mengatasi Banjir
3. Merintis Angkutan Massal
4. Layanan Kesehatan Gratis
5. Bangun Mal PKL Revitalisasi Pasar Tradisional
6. Menyediakan Ruang Publik
7. Birokrasi Bersih Profesional
8. Gubernur - Wagub Tanpa Voorijder
9. Pendidikan Gratis





Janji Jokowi – Ahok

2012-2017



NO	JANJI	TARGET	STRATEGI	PROGRAM	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Revitalisasi Pemukiman Padat dan Kumuh					
2.	Mengatasi Banjir					
3.	Merintis Angkutan Massal					
4.	Layanan Kesehatan Gratis					
5.	Bangun Mal PKL Revitalisasi Pasar Tradisional					
6.	Menyediakan Ruang Publik					
7.	Birokrasi Bersih Profesional					
8.	Gubernur - Wagub Tanpa Voorijder					
9.	Pendidikan Gratis					



Janji Jokowi – Ahok

2012-2017



NO	JANJI
1.	Revitalisasi Pemukiman Padat dan Kumuh <ul style="list-style-type: none">• Revitalisasi pemukiman padat dan kumuh tanpa melakukan penggusuran.• Pembangunan superblok rumah susun yang dilengkapi ruang publik berupa taman, pasar, dan pusat layanan kesehatan.
2.	Mengatasi Banjir <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan Embung/Folder untuk menangkap dan menampung air hujan di setiap kecamatan dan di setiap kelurahan.• Kerja sama dengan daerah penyangga Jakarta untuk membuat sebuah otoritas yang mengatur dan mengelola sungai-sungai yang bermuara di Jakarta.• Mengintegrasikan seluruh saluran drainase agar terkoneksi dengan kanal-kanal pembuangan air.



Janji Jokowi – Ahok

2012-2017



NO	JANJI
3.	<p>Merintis Angkutan Massal</p> <ul style="list-style-type: none">• Memperbanyak angkutan massal.• Memperbanyak armada angkutan umum, terutama bus TransJakarta di koridor-koridor yang tetap dipertahankan sebagai jalur bus khusus.• Dirintis pembangunan MRT/subway. Nantinya sebagian busway akan diubah menjadi railbus yang berkapasitas lebih besar.• Bekerja sama dengan pemerintah sekitar Jakarta untuk membuat otoritas pelayanan transportasi Jabodetabek agar persoalan mobilitas warga bisa ditangani oleh badan yang memiliki otoritas lintas daerah.• Kendaraan umum seperti Metro Mini, Kopaja, dan Bus diganti dengan kendaraan yang lebih layak agar warga nyaman menggunakan kendaraan umum.• Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui sistem <i>Electronic Road Pricing</i> (ERP), sewa parkir yang tinggi, pengaturan kendaraan berdasarkan nomor polisi genap-ganjil, dan pengaturan jam kerja.



Janji Jokowi – Ahok

2012-2017



NO	JANJI
4.	Layanan Kesehatan Gratis <ul style="list-style-type: none">• Kartu Sehat diluncurkan. Kartu ini bisa memperpendek jalur birokrasi pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah. Pembayaran layanan ini ditanggung pemerintah.• Disediakan Pusat Kesehatan Masyarakat di pasar-pasar tradisional, terutama pasar-pasar yang dibangun di superblok untuk kalangan menengah ke bawah.
5.	Bangun Mal PKL Revitalisasi Pasar Tradisional <ul style="list-style-type: none">• Membangun mal khusus bagi PKL agar lebih tertib sehingga tidak mengganggu pengguna jalan, berdasarkan pengalaman Jokowi menata 5.817 pedagang kaki lima (PKL) di Solo tanpa unjuk rasa.• Keberadaan pasar tradisional diperhatikan sehingga bisa bersaing dengan pasar modern dan menggerakkan peronomian warga kota.• Hal ini dilakukan Jokowi karena pasar modern tidak menolong rakyat kecil. Padahal jika pasar tradisional dan PKL dikelola dengan baik bisa mendatangkan untung besar.



Janji Jokowi – Ahok

2012-2017



NO	JANJI
6.	Menyediakan Ruang Publik <ul style="list-style-type: none">• Memfasilitasi pergaulan warga dengan menyediakan sarana mengekspresikan diri. Hal itu dilakukan dengan menyediakan ruang-ruang publik.• Membangun kebudayaan warga kota berbasis komunitas.• Pembangunan pusat kebudayaan Jakarta di lima wilayah administratif.• Merevitalisasi dan melengkapi fasilitas kawasan Old Batavia. Tujuannya adalah agar menjadi daya tarik wisata sejarah dan budaya di Jakarta.
7.	Birokrasi Bersih Profesional <ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan Reformasi Birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan profesional.• Waktu pengurusan izin dipercepat dan lebih pendek, maksimal hingga enam hari kerja.



Janji Jokowi – Ahok

2012-2017



NO	JANJI
8.	<p>Gubernur - Wagub Tanpa Voorijder</p> <ul style="list-style-type: none">• Gubernur dan wakilnya tidak akan menggunakan <i>voorijder</i> yang membuat mereka tidak merasakan kemacetan jalanan Ibukota.• Hanya akan berada di kantor selama 1 jam. Sisa waktunya akan digunakan untuk meninjau proses pembangunan dan pelayanan publik di lapangan.• Untuk mendukung pelayanan hingga ke tingkat terkecil pemerintahan, insentif pada Ketua RT dan RW dinaikkan.• Kepada wartawan terbuka, tidak akan ngambek atau tersinggung bila ada pertanyaan wartawan yang dinilai menyudutkan.• Meniadakan pentungan dan perlengkapan yang memungkinkan Polisi Pamong Praja melakukan kekerasan terhadap warga.



Janji Jokowi – Ahok

2012-2017



NO	JANJI
9.	<p>Pendidikan Gratis</p> <ul style="list-style-type: none">• Kartu Jakarta Pintar diluncurkan. Dengan kartu ini maka warga Jakarta dapat merasakan pendidikan gratis dari SD hingga SMA.• Ide kartu pintar ini muncul karena sepanjang pengetahuan Jokowi-Ahok, banyak anak yang putus sekolah di SMP dan SMA. Program yang sama, menurut Jokowi, telah berhasil diterapkan di Solo selama 5 tahun.• Dalam kampanye di Kampung Sawah, Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, Jumat 29 Juni 2012 Jokowi berkomitmen merealisasikan apa yang telah disampaikan kepada warga. "Kalau apa yang saya sampaikan tidak terbukti, tagih janji itu" ujarnya.

Kerangka RPJMD



1. Arah kebijakan keuangan daerah
2. Strategi pembangunan daerah
3. Kebijakan umum
4. Program satuan kerja perangkat daerah
5. Program lintas satuan kerja perangkat daerah,
6. Program kewilayahan
7. Rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

Sumber: Pasal 5 UU 25 Tahun 2004

Sistematika Penulisan RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



Provinsi/Kabupaten/Kota

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
- 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan lainnya
- 1.5. Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan Daerah

Menggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh

- 2.1 Kondisi Geografis Daerah
- 2.2 Pelayanan Umum
- 2.3 Ketertiban dan Ketentraman
- 2.4 Ekonomi
- 2.5 Lingkungan Hidup
- 2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum
- 2.7 Kesehatan
- 2.8 Pendidikan

Sistematika Penulisan RPJMD

- 2.9 Pariwisata dan Budaya
- 2.10 Pendidikan
- 2.11 Perlindungan sosial
- 2.12 Keuangan Daerah
- 2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan Daerah

Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait

- 3.1 RPJM Nasional
- 3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk RPJM Provinsi)
- 3.3 RPJM Provinsi
- 3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/Kota)

Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah

- 4.1 Visi
- 4.2 Misi
- 4.3 Agenda (apabila ada)

Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan daerah.

- 5.1 Tujuan
- 5.2 Strategi
- 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi pemerintahan daerah)
- 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Bab VI Program Pembangunan Daerah

Untuk masing-masing program perlu dicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif

- 6.1 Program Pembangunan
 - 6.1.1 Program SKPD
 - 6.1.2 Program Lintas SKPD
 - 6.1.3 Program Lintas Kewilayah

Sistematika Penulisan RPJMD

6.2 Program Pengembangan Kelembagaan dan Legislasi Daerah

Bab VII Kaidah Pelaksanaan

Mengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan RPJMD secara efektif

7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD

7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD

7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD

7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas *Non Government Stakeholders* untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD

Lampiran

Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup:

1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan, Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan daerah
2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD
3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah
4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun Ialu (Penerimaan dan Belanja)
5. Proyeksi Fiskal Daerah
6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah

Contoh: Outline RPJMD DKI

BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Maksud dan Tujuan
- Landasan Hukum
- Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- Kondisi Geografis
- Kondisi Demografi
- Sumber Kekayaan Alam
- Kondisi menurut Aspek Kehidupan
- Kondisi menurut Urusan Pemerintahan

BAB III VISI DAN MISI

- Visi
- Misi

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

- Tujuan Pembangunan Daerah
- Strategi Pembangunan Daerah
- Pendekatan

BAB V ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH

- Urusan Wajib
- Urusan Pemerintahan

BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH

- Umum
- Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
- Arah Kebijakan Belanja Daerah
- Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- Program Dedicated
- Program menurut Urusan Pemerintahan
- Program Kewilayahannya

BAB VIII PENUTUP



Latihan SWOT Bappeda Kabupaten Agam

Strengths

No	Variabel	NU	BF	Total
1.	SDM yang berkualitas	5	30	150
2.	Kelembagaan yang jelas	1	10	10
3.	Sarana dan Prasarana yang lengkap	3	20	60
4.	Kepemimpinan yang kooperatif	4	25	100
5	Disiplin yang tinggi	2	15	30
	Total		100	350

Weaknesses

No	Variabel	NU	BF	Total
1.	Kurangnya pelatihan di LN	2	10	20
2.	Anggaran Terbatas	5	40	200
3.	Tupoksi tidak sesuai dg Latarbelakang pendidikan	1	5	5
4.	Belum menggunakan IT	3	20	60
5	Lemahnya database	4	25	100
	Total		100	385

Opportunities

No	Variabel	NU	BF	Total
1.	Kepercayaan penuh dari bupati	5	30	150
2.	Kepercayaan dari masyarakat	1	10	10
3.	Banyaknya beasiswa dan pelatihan dr LN dan pemerintah pusat	4	25	100
4.	Dukungan dari SKPD	2	15	30
5	Hubungan dg legislatif baik	3	20	60
	Total		100	350

Threats

No	Variabel	NU	BF	Total
1.	Lelang jabatan	2	15	30
2.	LSM mencari-cari kesalahan	4	25	100
3.	Regulasi tidak sinkron	1	5	5
4.	Pemeriksaan dr inspektorat, BPK, kejaksaan, polri	5	35	165
5	Kurang harmonis dg DPKD dalam hal penganggaran	3	20	60
	Total		100	360

Perumusan Visi-Misi



VISI

- Visi Pembangunan Daerah dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah (Pilkada),
- Visi tersebut seharusnya mengambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.



Kriteria Rumusan Visi

1. Mengambarkan dengan jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.
2. Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah.
3. Disertai penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah menjadi acuan bagi perumusan strategi, kebijakan dan program
4. Disertai penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan di daerah, relevansi visi dengan permasalahan dan potensi pembangunan daerah.
5. Sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

M I S I



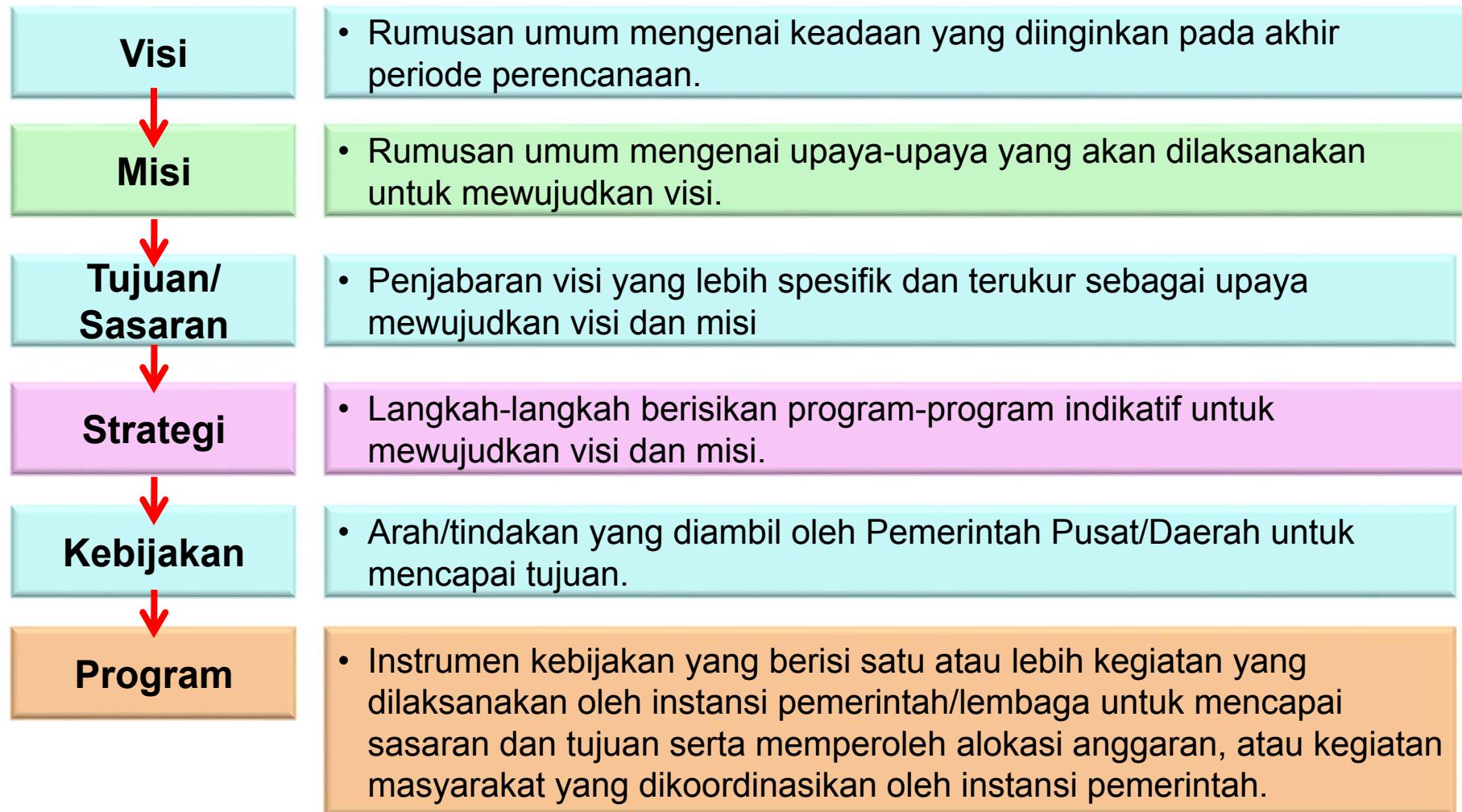
- Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
- Rumusan misi merupakan hal yang penting memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran dan arah kebijakan yang ingin dicapai dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai misi

Kriteria Perumusan Misi

1. Menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah.
2. Disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal dan internal daerah.
3. Disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah diingat.

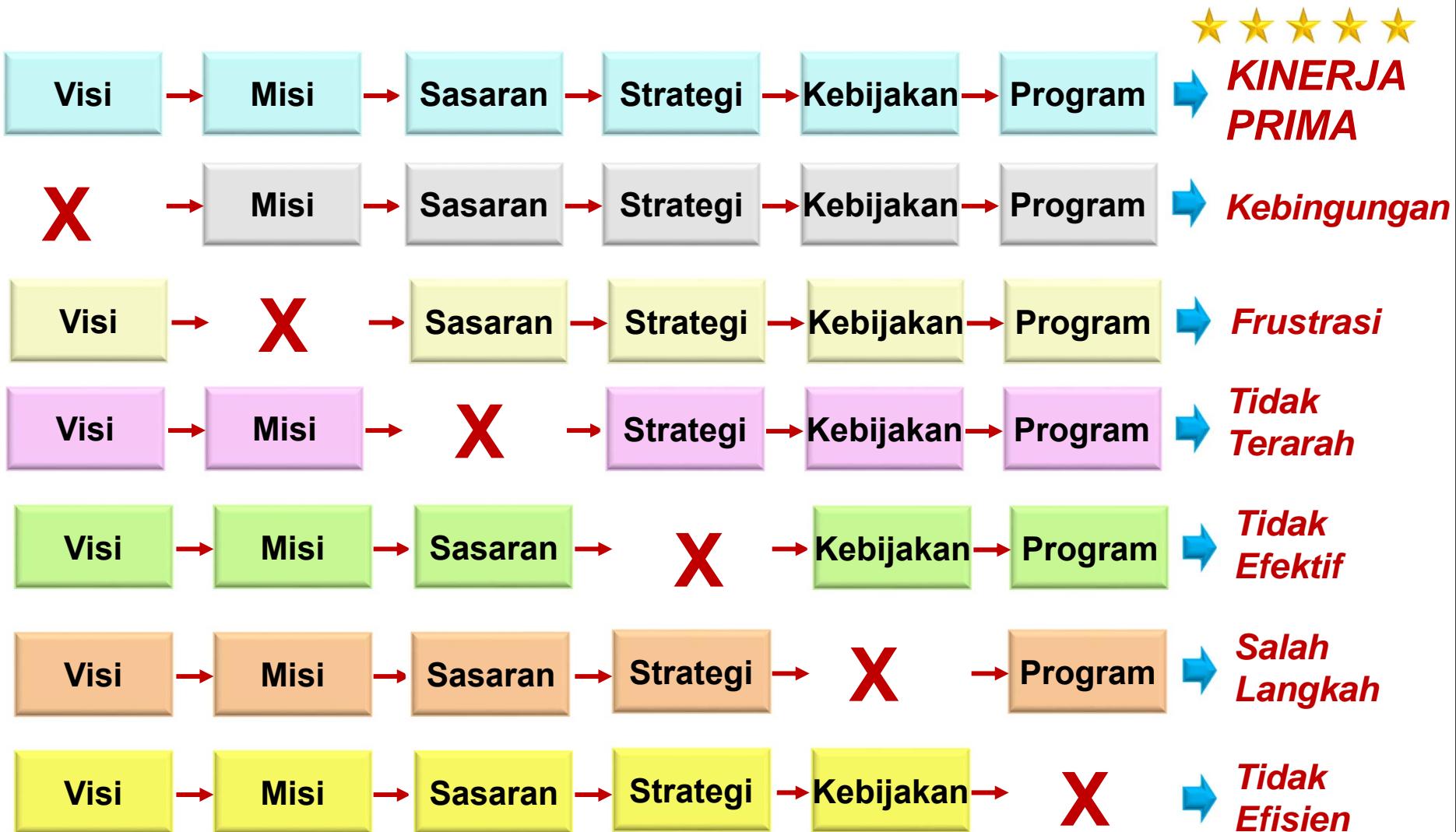


Hirarki dari Visi ke Program



Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program

(Mengacu pada Struktur UU 25/2004)



Yang Harus Diingat

- ***Konsistensi Internal (dalam dokumen itu sendiri):***
 - Visi → Misi → Tujuan → Sasaran → Strategi → Kebijakan → Program → Kegiatan → Pagu Indikatif.
- ***Konsistensi Ekternal :***
 - Apakah sudah mengacu/selaras kepada dokumen diatasnya seperti RTRW, RPJPD, RPJMD, Renstra Provinsi/K/L dan lain-lain

Tujuan dan Sasaran



- Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah
- Yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan

- **Tujuan adalah** pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan.
- **Kriteria Tujuan:**
 1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi,
 2. Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan,
 3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah,
 4. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti

Sasaran

- **Sasaran adalah** hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun.
- **Kriteria Sasaran:**
 1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan.
 2. Untuk mencapai tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran.
 3. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah.
 4. Memenuhi kriteria SMART

Perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah



Langkah Penyusunan Tujuan dan Sasaran

1. Merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program Kepala Daerah terpilih.
2. Menguji apakah rancangan pernyataan dapat memecahkan isu-isu strategis dalam jangka menengah.
3. Merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran pada setiap tujuan
4. Merumuskan rancangan capaian indikator yang terukur dari setiap sasaran, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria indikator kunci.
5. Menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi:

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1:	Tujuan	Sasaran

Contoh dari Misi ke Tujuan

Visi 2013-2018: “Riau Maju, Sejahtera dan Ihsan”

Misi	Tujuan
Menyelenggarakan tata kelola kepemerintahan yang baik.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
Membangun prasarana dan sarana yang serasi dengan dinamika dan pertumbuhan kota.	Mewujudkan ketersediaan prasarana dan sarana kota yang merata bagi seluruh warga.
Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya.	Mewujudkan kehidupan warga yang dinamis, inovatif,kreatif dan berperan aktif dalam pembangunan.
Meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan investasi, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif.	<ul style="list-style-type: none">• Mewujudkan pemenuhan kehidupan dasar pendidikan dan kesehatan.• Memenuhi kebutuhan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tenteram dan damai.	Mewujudkan kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan kehidupan beragama yang kondusif dan terpelihara.

Strategi dan Arah Kebijakan



- Strategi dan Arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien

Strategi

- **Strategi adalah** langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
- Rumusan Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan
- **Langkah-Langkah dalam merumuskan Strategi:**
 1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistik dan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
 2. Menetukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
 3. Melakukan evaluasi untuk menentukan langkah yang paling tepat antara lain menggunakan metode SWOT.

Arah Kebijakan

- **Arah Kebijakan** adalah Pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu-kewaktu selama 5 (lima) tahun.
- Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya
- **Kriteria Arah Kebijakan:**
 1. Memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu
 2. Dirumuskan bersamaan dengan formulasi strategi, sebelum atau setelah alternatif strategi dibuat,
 3. Membantu menghubungkan tiap-tiap startegi kepada sasaran secara lebih rasional,
 4. Mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	: Terwujudnya masyarakat provinsi/kabupaten/kota yang beriman dan berdaya saing		
MISI I	:		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Arah kebijakan 1.1 2. Arah kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 1. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 1. Dst.....	1. Arah kebijakan 2.1 2. Arah kebijakan 2.2 1. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
MISI II	:		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst...	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	1. Arah kebijakan 1.1 2. Arah kebijakan 1.2 3. Dst...
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst...	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	1. Arah kebijakan 2.1 2. Arah kebijakan 2.2 3. Dst...
Dst.....	Dst.....	Dst.....	Dst.....
Dst			

Contoh dari Visi sampai Program



Evaluasi Kualitas RPJMD

- | | |
|--|-----|
| 1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah | ✓ . |
| 2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah | ✓ . |
| 3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih <u>sesuai dengan:</u> <ul style="list-style-type: none">▪ Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (<i>strengths</i>) dan mengatasi kelemahan (<i>weaknesses</i>)▪ Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (<i>opportunities</i>) dan mengatasi ancaman (<i>threats</i>) | ✓ . |

Evaluasi Kualitas RPJMD

4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan daerah <u>sesuai dengan:</u> <ul style="list-style-type: none">▪ Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (<i>strengths</i>) dan mengatasi kelemahan (<i>weaknesses</i>)▪ Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (<i>opportunities</i>) dan mengatasi ancaman (<i>threats</i>)	✓ .
5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah.	✓ .
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program pembangunan daerah.	✓ .

Evaluasi Kualitas RPJMD

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah <u>sesuai dengan</u> rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8. Rumusan program pembangunan daerah <u>sesuai dengan</u> kendala fiskal daerah | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11. Kualitas RPJMD sudah SMART | <input checked="" type="checkbox"/> |

Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019



Ruang Lingkup SPPN

- UU 25/2004 tentang SPPN mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh **Pemerintah Pusat** maupun **Pemerintah Daerah**.



Tujuan SPPN



1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



RPJM Daerah

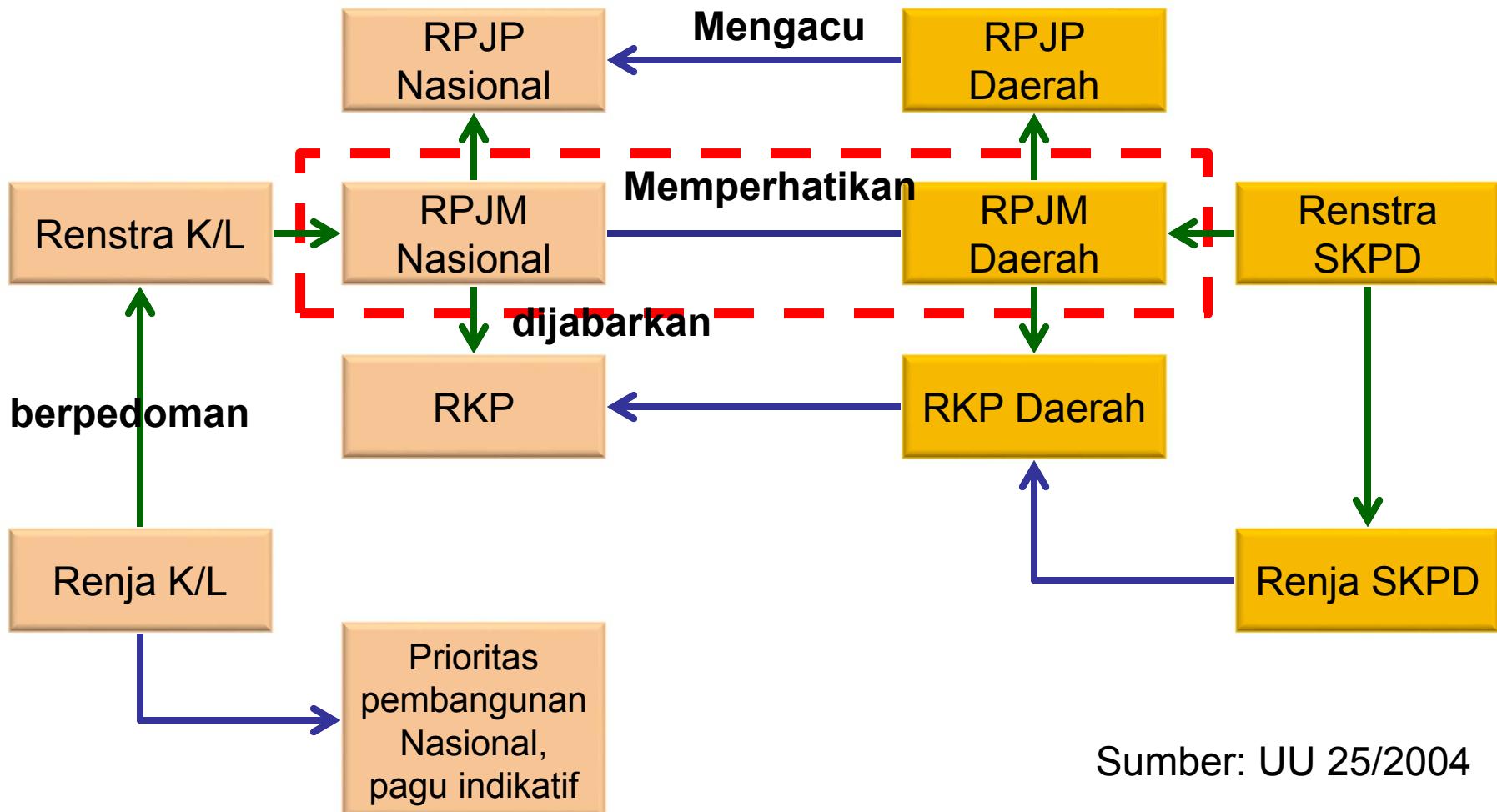
- **RPJM Daerah** merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah
- yang penyusunannya **berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional,**
- memuat:
 1. arah kebijakan keuangan Daerah,
 2. strategi pembangunan Daerah,
 3. kebijakan umum, dan
 4. program SKPD, lintas SKPD, dan
 5. program kewilayahan
- disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sumber: Pasal 5 UU 25 Tahun 2004

Peraturan terkait Penyelarasan RPJMN dan RPJMD

No	Peraturan	SPPN	Pemerintahan Daerah
1.	Undang-Undang	UU 25/2004	<ul style="list-style-type: none">• UU 32/2004• UU 23/2014
2.	Peraturan Pemerintah	PP 40/2006	PP 8/2008
3.	Peraturan Menteri	Permen PPN 1/2014	Permendagri 54/2010
4.	Surat Edaran Bersama	0199/M PPN/04/2010	28/2010
5.	Peraturan lainnya	Juklak Sesmen PPN No. 3/Juklak/Sesmen/06/2014	

Hubungan Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah



Fungsi RPJMN

- RPJM Nasional berfungsi sebagai:
 1. Pedoman penyesuaian dalam rangka penetapan Renstra-KL; dan
 2. Bahan penyusunan dan perbaikan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas pemerintah daerah dalam mencapai sasaran nasional yang termuat dalam RPJM Nasional



Sumber: Pasal 17 PP 40/2006

Penyesuaian RPJMD terhadap RPJMN

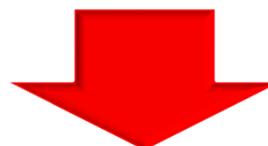


- Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 dilakukan melalui **Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD** dengan RPJMN 2015-2019.

Sumber: Pasal 14 Permen PPN 1/2014

Bilateral Meeting

- ***Bilateral Meeting*** Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 adalah pertemuan dua pihak antara Kementerian Perencanaan dengan Pemerintah daerah Provinsi yang bertujuan untuk menjaga konsistensi sasaran masing-masing **program/kegiatan pokok RPJMD dengan sasaran program/kegiatan strategis nasional**, penyesuaian target dan pendanaannya.



RPJMD tidak mengatur kegiatan pokok di dalamnya

Sumber: Pasal 1 Permen PPN 1/2014

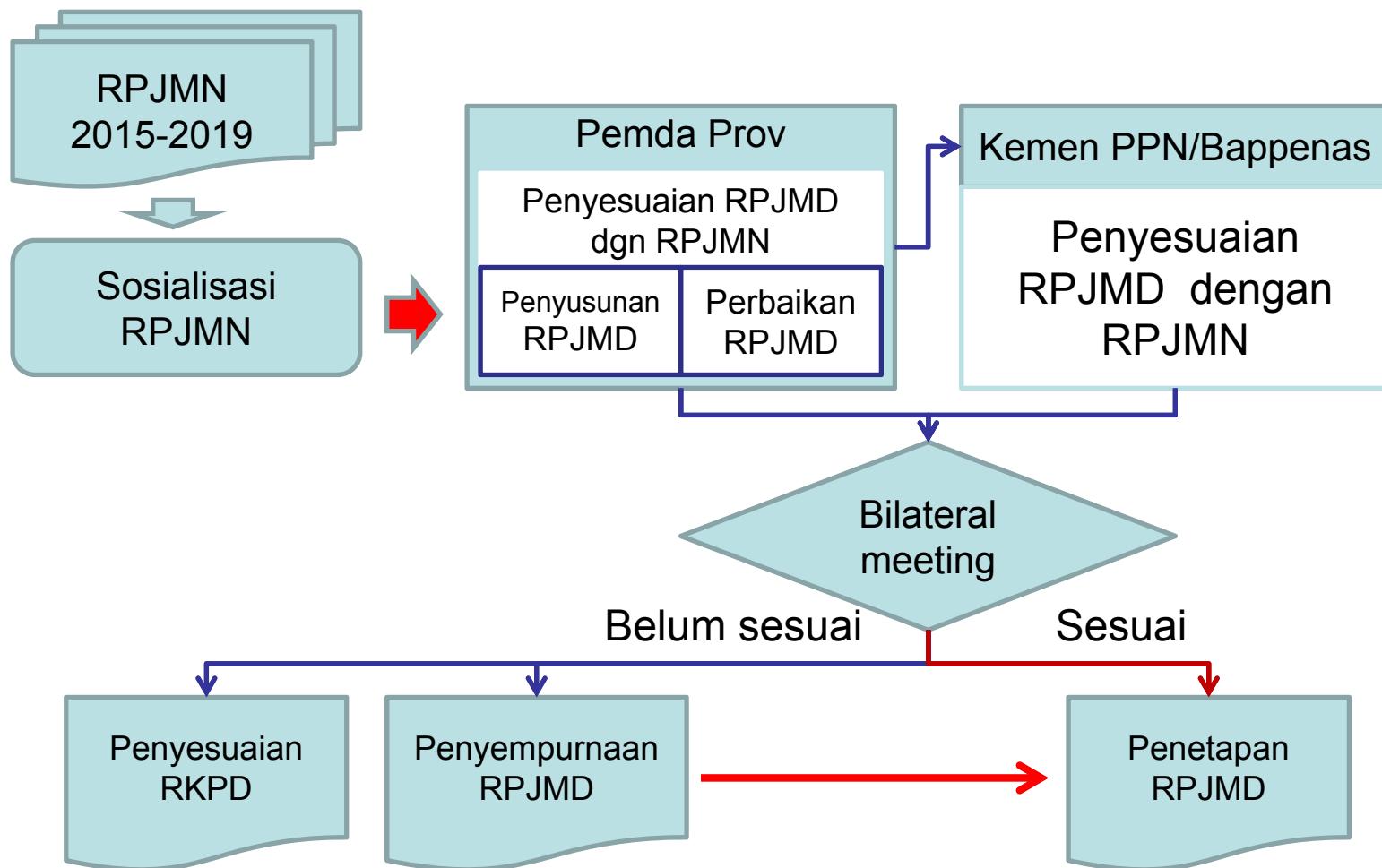
Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019



- Tujuan Penyesuaian RPJM Daerah dengan RPJM Nasional 2015-2019:
 1. Menjaga konsistensi dan sinergi sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 menjadi prioritas dalam RPJMD terkait.
 2. Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional.

Sumber: Anak Lampiran VIII Juklak Sesmen
PPN 3/6/2014

Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019



Sumber: Anak Lampiran VIII Juklak Sesmen PPN 3/6/2014

Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN 2015-2019

- Penyesuaian RPJMD kepada RPJMN:
 1. Konsistensi Sasaran Pokok RPJMD dengan Sasaran Pokok Nasional
 2. Konsistensi Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah mendukung pencapaian Prioritas Nasional
 3. Penyesuaian Target RPJMD dengan Target Prioritas Nasional Terkait
 4. Penyesuaian Pendanaan yang Dialokasikan
- Khusus untuk kegiatan strategis nasional, RPJMD harus menyesuaikan arah kebijakan dan strategi, sasaran program dan kegiatan yang mendukung kegiatan strategis nasional tersebut.

Sumber: Anak Lampiran VIII Juklak Sesmen
PPN 3/6/2014

Perencanaan Pembangunan Daerah



- Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
- Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diselarasankan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah

Sumber: Pasal 260 UU 23/2014

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

- RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat :
 1. tujuan,
 2. sasaran,
 3. strategi,
 4. Arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah,
 5. program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat
 6. indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
 7. dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Sumber: Pasal 263 UU 23/2014

Perubahan Dokumen Rencana Pembangunan

- RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat



**Dasar Hukum Perubahan RPJMD untuk
Penyelarasannya terhadap RPJMN**

Sumber: Pasal 264 UU 23/2014

Evaluasi Rancangan Dokumen Rencana Pembangunan

- Evaluasi terhadap rancangan Perda Provinsi tentang RPJMD yang dilakukan oleh Menteri (*Mendagri*) dilaksanakan untuk
 - menguji kesesuaian dengan RPJPD Provinsi dan RPJMN,
 - kepentingan umum dan/atau
 - ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi



Diperuntukkan bagi RPJMD baru, sedangkan belum ada aturan bagi RPJMD eksisting

Sumber: Pasal 269 UU 23/2014

Keselarasan RPJMD dan RPJM

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (Bab VI RPJMD)



Strategi, kebijakan umum, kerangka ekonomi makro, dan prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Buku I RPJMN 2010-2014;

Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah (Bab VII)



Pencapaian sasaran rencana pembangunan bidang-bidang sebagaimana tercantum dalam Buku II RPJMN 2010-2014;

Pencapaian sasaran program pembangunan jangka menengah daerah (Bab VIII)



Pencapaian sasaran dan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana tercantum dalam Buku III RPJMN 2010-2014.

Sumber: Pasal 3 SEB 3 Menteri/2010



Perangkat Pelaksanaan Penyelarasan



Ruang Lingkup Penyelarasan

Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran Pokok Pembangunan Nasional

Strategi Pembangunan Daerah

Tema Pengembangan Wilayah

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Tujuan Pengembangan Wilayah

Penyelarasan Sasaran Makro

Indikator	Target RPJMD	Target RPJMN
Pertumbuhan Ekonomi		
Tingkat Pengangguran		
Tingkat Kemiskinan		



Penyelarasan Sasaran Pokok

Sasaran	Ya	Tidak	Target RPJMD	Rekomendasi Target (hingga akhir periode RPJMD)
I. Sasaran Makro				
Pembangunan Manusia dan Masyarakat				
1. Indeks Pembangunan Manusia				
2. Indeks Pembangunan Masyarakat				
3. Indeks Gini				
4. Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan				
4. Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan				
- Pekerja Formal				
- Pekerja Informal				
Dst...				

Penyelarasan Strategi

- Penyelarasan Strategi (RPJMD) terhadap Tema Pengembangan Wilayah (RJMN)

Wilayah	Tema Pengembangan	Strategi Pembangunan Daerah
Papua	<ul style="list-style-type: none">• Percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;• Dst ...	
Maluku	<ul style="list-style-type: none">• Produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional• Dst ...	
dst...		

Penyelarasan Arah Kebijakan

- Penyelarasan arah kebijakan (RPJMD) terhadap Tujuan pengembangan wilayah (RPJMN)

Wilayah	Tujuan Pengembangan	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Nusa Tenggara	<ul style="list-style-type: none">a. pengembangan pariwisata ekologis, serta pengembangan industri berbasis komoditas peternakan terutama sapi, garam, rumput laut, jagung, mangan, dan tembaga;b. penyediaan infrastruktur wilayah;c. dst	
Sulawesi	<ul style="list-style-type: none">a. pengembangan industri berbasis logistik, komoditas kakao, jagung, perikanan, padi, rotan, aspal, nikel, bijih besi, dan gas bumi, serta pengembangan pariwisata bahari;b. dst	
Sumatera	<ul style="list-style-type: none">a. pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin;b. Dst...	
Dst...		

Indikasi Lokasi Pengembangan Kawasan Industri Provinsi Jawa Barat 2015-2019

No.	Kawasan Industri	Kabupaten	Luas	Komoditi Utama
1	Cilamaya	Karawang	3.100,0 Ha	Otomotif dan Permesinan
2	Majalengka	Majalengka	877,0 Ha	Tekstil dan Produk Tekstil
3	Sukabumi	Sukabumi	900 Ha	Industri Alat Berat & Komp
4	Subang	Subang	1000 Ha	Otomotif dan Permesinan

Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi 2015-2019

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
DKI Jakarta	5.4	6.5	7.2	7.3	7.9
Jawa Barat	5.5	6.6	7.1	7.8	7.7
Banten	4.9	5.6	6.4	6.8	7.7
Jawa Tengah	5.7	6.7	7.1	7.5	7.7
D.I Yogyakarta	5.3	5.9	6.1	6.4	6.5
Jawa Timur	6.2	6.6	7.1	7.3	7.9
Bali	7.5	7.3	7.8	8.3	8.6

Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi 2015-2019

Wilayah	Tingkat Kemiskinan (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
DKI Jakarta	3.4	3.2	3.0	2.7	2.5
Jawa Barat	8.9	8.2	7.6	6.9	6.3
Banten	5.3	4.9	4.5	4.1	3.7
Jawa Tengah	13.1	12.2	11.3	10.4	9.5
D.I Yogyakarta	13.8	12.8	11.8	10.9	9.9
Jawa Timur	12.0	11.2	10.4	9.6	8.7
Bali	4.0	3.7	3.5	3.2	2.9

Sasaran Tingkat Pengangguran Wilayah Jawa-Bali Per Provinsi 2015-2019

Wilayah	Tingkat Pengangguran (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
DKI Jakarta	9.3	9.1	8.8	8.5	8.3
Jawa Barat	8.6	8.3	8.0	7.7	7.4
Banten	9.6	9.2	8.8	8.4	8.0
Jawa Tengah	5.4	5.2	5.1	4.9	4.7
D.I Yogyakarta	3.8	3.7	3.6	3.4	3.3
Jawa Timur	4.0	3.9	3.7	3.6	3.5
Bali	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6

Tabel 7.9

Prioritas Lokasi Pengembangan Pusat Kegiatan Jawa Barat 2015-2019

Pusat Kegiatan dalam RTRWN		
PKN	PKW	PKSN
Kawasan Perkotaan Jabodetabek (I/C/3)	Pandeglang (II/B)	
Serang (I/C/1)	Rangkas Bitung (II/B)	
Cilegon (I/C/1)		
Kawasan Perkotaan Bandung Raya (I/C/3)	Sukabumi (I/C/1)	
Cirebon(I/C/1)	Cikampek – Cikopo (I/C/1)	
	Pelabuhanratu (II/C/2)	
	Indramayu (II/C/1)	
	Kadipaten (II/C/2)	
	Tasikmalaya (I/C/1)	
	Pangandaran (II/C/2)	

Simulasi Penyelarasan RPJMD-RPJMN

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Jawa Barat

Perkeretaapian Diperuntukkan bagi Pengangkutan Penumpang dan Barang

RPJMN	RPJMD Jabar	RPJMD Pangandaran
<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan Jalur KA Bandung-Tanjungsari-Sumedang-Kertajati-Kadipaten-Cirebon2. Pembangunan Jalur KA Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang3. Pembangunan jalur ganda KA antara Padalarang - Bandung - Cicalengka (KA Perkotaan Bandung termasuk elektrifikasi)4. Pembangunan jalur KA baru lingkar luar Jabodetabek antara Parungpanjang - Citayam5. Pembangunan double-double track (DDT) antara Manggarai –Jatinegara – Bekasi - Cikarang6. Lanjutan pembangunan shortcut antara Cibungur - Tanjung Rasa		

Perkeretaapian Diperuntukkan bagi Pengangkutan Penumpang dan Barang

RPJMN	RPJMD Jabar	RPJMD Pangandaran
7. Pembangunan jalur KA antara Cangkring - Pelabuhan Cirebon 8. Elektrifikasi rei ganda KA Cikarang-Cikampek 9. Reaktivasi jalur KA antara Rancaekek - Tanjung. Sari 10. Pembangunan jalur KA baru antara Tanjung Sari - Kertajati 11. Reaktivasi jalur KA antara Cirebon - Kadipaten dan pembangunan jalur KA baru antara Kadipaten - Bandara Kertajati 12. Reaktivasi jalur KA antara Banjar –Kroya		

Perkeretaapian Diperuntukkan bagi Pengangkutan Penumpang dan Barang

RPJMN	RPJMD Jabar	RPJMD Pangandaran
13. Reaktivasi jalur KA antara Banjar - Pangandaran - Cijulang 14. Pembangunan monorail Bandung Raya (Pemprov Jabar, KPS) 15. Pembangunan Jalur KA ganda Parsial Jalur KA Cisomang-Cikadongdong 16. Pembangunan Jalur KA ganda Jalur Cikadongdong-Padalarang 17. Pembangunan Jalur KA ganda KA Parungpanjang-Tenjo 18. Pembangunan Jalur KA ganda Parsial Purwakarta-Ciganea 19. Pembangunan Jalur KA Elektrifikasi Citayam-Nambo		

Perkeretaapian Diperuntukkan bagi Pengangkutan Penumpang dan Barang

RPJMN	RPJMD Jabar	RPJMD Pangandaran
20. Pembangunan Jalur KA Shortcut Jalur KA Cibungur-Tanjungrasa 21. Pembangunan Jalur KA Stasiun Kejaksan-Pelabuhan Cirebon 22. Pembangunan Jalur KA Bandung-Tanjungsari 23. Terminal Terpadu (Kereta Api) Gedebage 24. Light Rail Transit (LRT) Kota Bandung		

Perhubungan Darat

RPJMN	RPJMD Jabar	RPJMD Pangandaran
<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Bandung*2. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Bogor*3. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Bekasi*4. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Depok*5. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Cimahi*6. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Tasikmalaya*		

Perhubungan Udara

RPJMN	RPJMD Jabar	RPJMD Pangandaran
<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan Bandara Kertajati*2. Pengembangan Bandar Udara Nusawiru di Kab. Pangandaran3. Pengembangan Bandar Udara Cakrabhuwana Kab. Cirebon4. Pembangunan Airstrip Pangandaran		

Perhubungan Laut

RPJMN	RPJMD Jabar	RPJMD Pangandaran
<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Pelabuhan Pemanukan2. Pembangunan Pelabuhan Laut Regional di Jawa Barat Selatan3. Pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon di Kota Cirebon4. Pembangunan Pelabuhan Laut di Indramayu untuk mendukung pariwisata ke Pulau Biawak5. Pembangunan Pelabuhan Muara Gembong dan Tarumajaya di Kab. Bekasi6. Pengembangan Pelabuhan Pangandaran		

Jalan

RPJMN	RPJMD Jabar	RPJMD Pangandaran
1. Pembangunan Jalan Tol Ciawi-Sukabumi 2. Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing 3. Pembangunan Jalan Tol Cikampek-Palimanan 4. Pembangunan Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan 5. Pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung 6. Pembangunan Jalan tol Pasir Koja- Soreang 7. Pembangunan Jalan Tol Kota Bandung (BIUTR) 8. Pembangunan Flyover Kopo (Bandung) dan Bulak Kapal (Bekasi) 9. Pembangunan Flyover Kopo (Bandung) - Keracondong 10. Pembangunan Flyover Bulak Kapal (Bekasi)		

Energi

RPJMN	RPJMD Jabar	RPJMD Pangandaran
1. Pipa Cirebon-Bekasi 220 km		

Ketenagalistrikan

RPJMN	RPJMD Jabar	RPJMD Pangandaran
1. PLTGU Jawa-1 1600 MW 2. PS Upper Cisokan Pump Storage (FTP2) 1040 MW 3. PLTU Jawa-1 (FTP2) 1000 MW 4. PLTGU Muara Tawar Add-on 2,3,4 650 MW 5. PLTGU Peaker Jawa Bali -1 400 MW 6. PLTGU/MG Peaker Jawa-Bali 4 300 MW 7. PLTGU/MG Peaker Jawa-Bali 4 150 MW 8. PLTA Jatigede (FTP2) 110 MW 9. PLTP Patuha (FTP2) 110 MW 10. PLTP Tangkuban Perahu I (FTP2) 55 MW 11. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi		

Telekomunikasi dan Informatika

RPJMN	RPJMD Jabar	RPJMD Pangandaran
<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI		

Sumber Daya Air

RPJMN	RPJMD Jabar	RPJMD Pangandaran
<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan Waduk Ciawi (2015-2018) Bogor2. Revitalisasi Situ - Jawa Barat (25 Situ)3. Pembangunan SPAM Air Baku Kali Baru Barat dan Kali Baru Timur Bogor4. Pembangunan DI Sadawarna Subang, Indramayu5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi SS Sukamandi Cs, SS Jengkol Cs, SS Gadung Cs, SS Rancabango Cs, dan SS Beres - Kab Subang (Loan World Bank - WISMP2) Bekasi6. Pembebasan Tanah untuk Floodway Cisangkuy Bandung7. Pembangunan Floodway Cisangkuy Bandung8. Pembangunan Retensi Cieunteung Bandung		

Sumber Daya Air

RPJMN	RPJMD Jabar	RPJMD Pangandaran
9. Pembangunan relokasi tanggul s. Citarum Hilir, desa Teluk Buyung Kab. Karawang 10. Pembebasan lahan untuk pembangunan tanggul s. Citarum Hilir, desa Pantai Sederhana Kab. Bekasi 11. Pembangunan tanggul s. Citarum Hilir, desa Pantai Sederhana Kab. Bekasi 12. Sodetan Sungai Cilamatan Ds. Wanasaki Kec Cipunagara Subang 13. Pembebasan Lahan untuk rehabilitasi 4 anak sungai - Loan JICA IP-559 Bandung 14. Upper Citarum Basin Flood Management (Loan JICA IP-559) Bandung 15. Peningkatan Kapasitas Sungai Citarum Hulu Rancamanyar s/d Nanjung Bandung		

Sumber Daya Air

RPJMN	RPJMD Jabar	RPJMD Pangandaran
16. Pembebasan Lahan untuk peningkatan kapasitas s. Citarum Hilir 17. Peningkatan Kapasitas Sungai Citarum Hilir dari s. Cikao s/d Muara Gembong Bandung 18. Pembangunan Check Dam di Sungai Cipamingkis Bogor 19. Pembangunan Waduk Tegal Luar Bandung 20. Pembangunan Waduk Santosa Bandung 21. Pembangunan Waduk Sadawarna Bandung 22. Pembangunan Waduk Cimeta Bandung 23. Pembangunan Waduk Sukawana Bandung 24. Pembangunan Waduk Cikapundung Bandung		

Sumber Daya Air

RPJMN	RPJMD Jabar	RPJMD Pangandaran
25. Pembangunan Waduk Citarik Bandung 26. Rehabilitasi Saluran Tarum Barat ruas Curug - Cibeet (Loan ADB - ICWRMIP) Karawang 27. Rehabilitasi Saluran Tarum Barat ruas Cibeet - Bekasi (Loan ADB - ICWRMIP) Bekasi 28. Rehabilitasi Saluran Tarum Barat ruas Bekasi-Cawang Bekasi 29. Operasi dan Pemeliharaan Sungai Citarum Hulu Sapan-Nanjung dan Anak-anak Sungai Citarum Hulu Bandung 30. Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Leuwigoong AMS-19A Garut 31. Pembangunan Jaringan Irigasi DI. Leuwigoong AMS-19B Garut		

Sumber Daya Air

RPJMN	RPJMD Jabar	RPJMD Pangandaran
32. Perbaikan Irigasi Kecil 78 Desa Provinsi Jawa Barat 33. Pengerukan Lembah Putri di Muara Sungai Ciputrapinggan Kab. Pangandaran 34. Perbaikan dan Pengaturan Sungai Cikidang di Ds. Babakan Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran Kab. Pangandaran 35. Pembangunan Acces Road Matenggeng Ciamis/Cilacap 36. Pembangunan Perkantoran Waduk Matenggeng Ciamis/Cilacap 37. Pembangunan Waduk Matenggeng Ciamis/Cilacap		

Sumber Daya Air

RPJMN	RPJMD Jabar	RPJMD Pangandaran
38. Pembebasan Tanah Bendungan Matenggeng Kab. Ciamis/ Kab. Cilacap 39. Pembangunan Pipa Transmisi Air Baku Tasikmalaya, Ciamis, Cilacap, Banyumas 40. Pembangunan Saluran pembawa Air Baku dari Waduk Jatiluhur 41. Rehabilitasi Daerah Irigasi Rentang.		

Air Minum

RPJMN	RPJMD Jabar	RPJMD Pangandaran
1. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Pondok Gede Bekasi		

Sanitasi

RPJMN	RPJMD Jabar	RPJMD Pangandaran
<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan Persampahan Kota Bandung (PLTSa Gedebage)2. Pembangunan Pengelolaan dan Pengolahan Akhir Persampahan Wilayah Bogor dan Depok (TPPAS Regional Nambo)3. Pembangunan TPA Legok Nangka		

Pendidikan

RPJMN	RPJMD Jabar	RPJMD Pangandaran
<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan gratis Sd, SLTP, SLTA diseluruh jawa barat, beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, keluarga atlit2. Pembangunan dan pengembangan SMK kelautan3. BOS untuk SMA, SMK4. Pendirian akademi komunitas5. Penegerian Politeknik Negeri Subang		

Kesehatan

RPJMN	RPJMD Jabar	RPJMD Pangandaran
<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan RS Pratama di Rancabuaya-Kab. Garut, Cidaun-Kab. Cianjur, Cipatujah-Kab. Tasikmalaya.2. Pengembangan RS Daerah RSUD Garut, RSUD Cililin-Kab. Bandung, RSUD Sukabumi.		

Perumahan

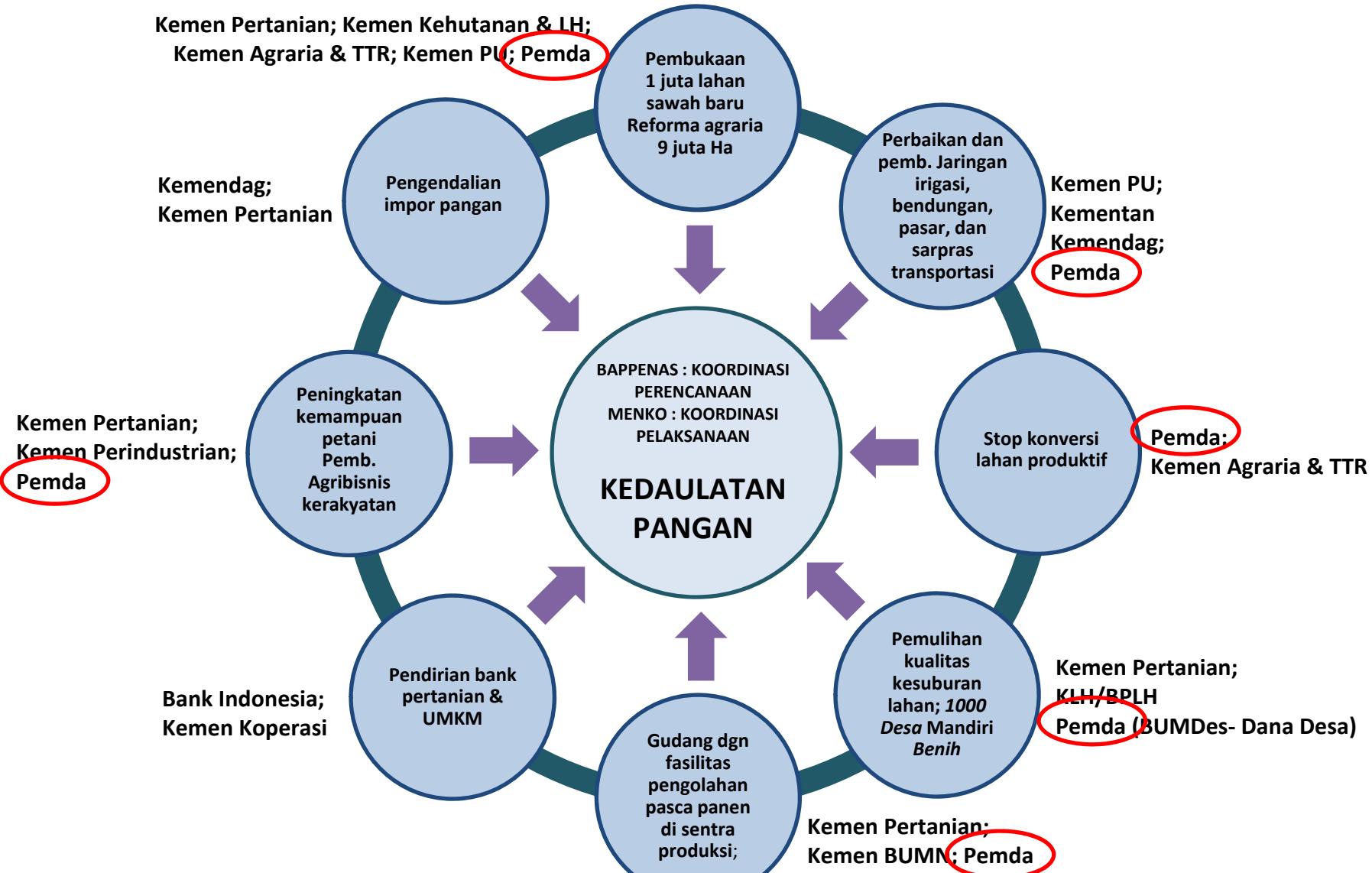
RPJMN	RPJMD Jabar	RPJMD Pangandaran
<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (masyarakat berpenghasilan rendah / MBR)2. Pembangunan perumahan dan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba)3. Pembangunan Rusunawa (Urban Renewal) di Metropolitan Bandung Raya dan Metropolitan Bodebek Karpur		

Penyelarasan RPJMD-RPJMN dalam Multilateral Meeting

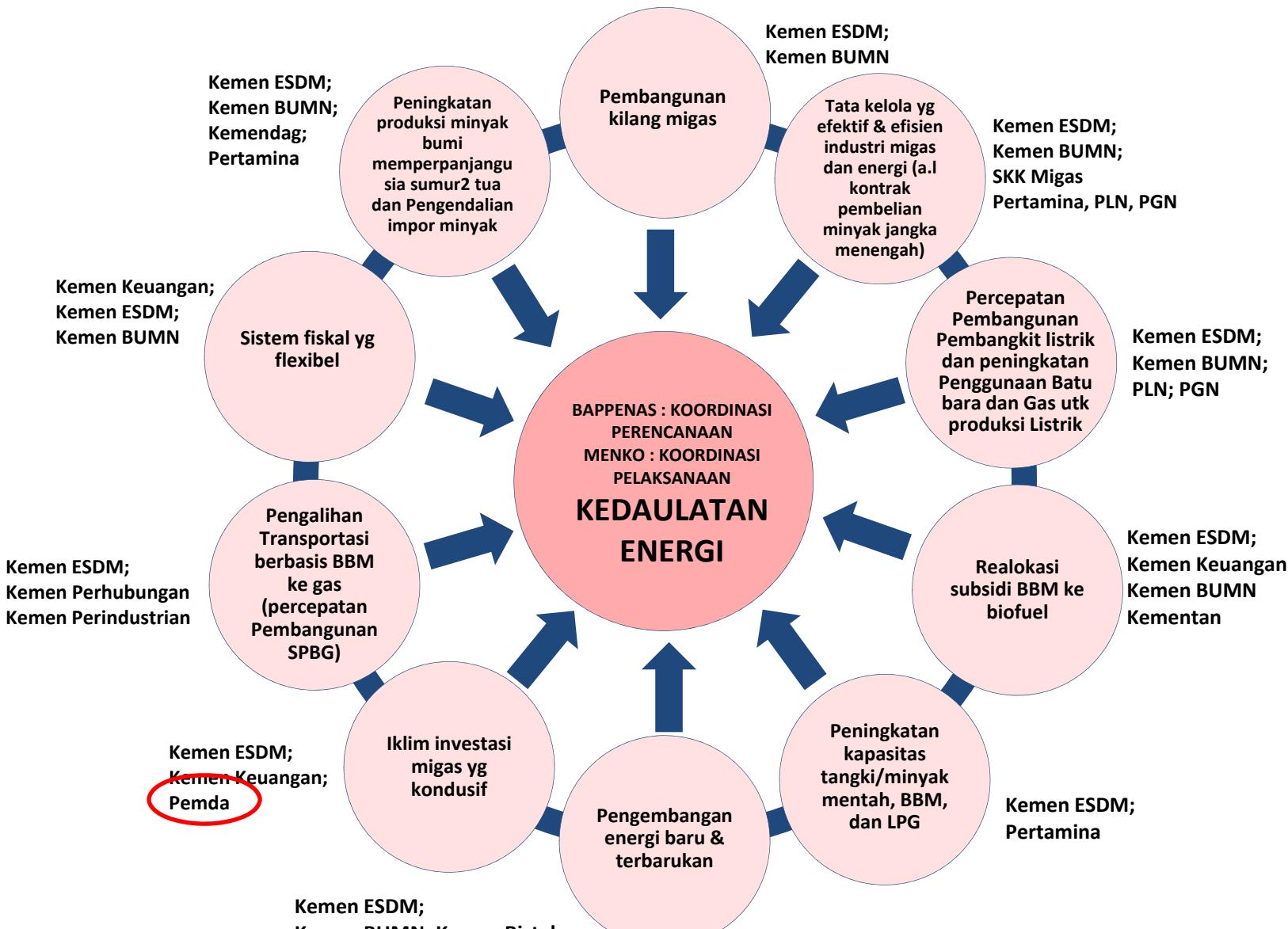
- Koordinasi Perencanaan Multilateral/K/L/D terhadap masing-masing **Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA)** meliputi:
 1. Kedaulatan pangan
 2. Kedaulatan energi
 3. Kemaritiman
 4. Industri/Kawasan Industri
 5. Pariwisata
 6. Revolusi mental
 7. Kawasan Perbatasan



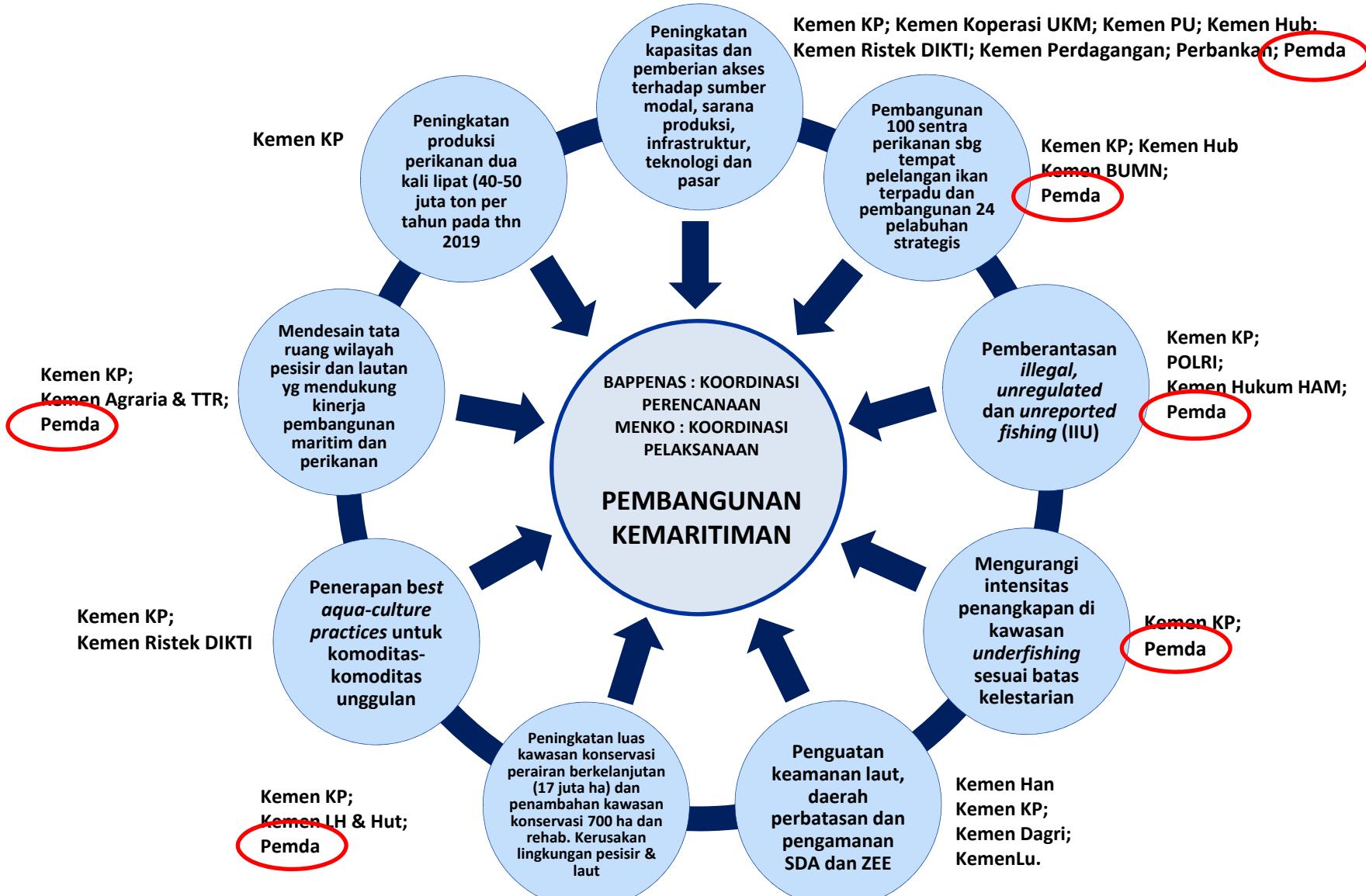
1. Kedaulatan Pangan



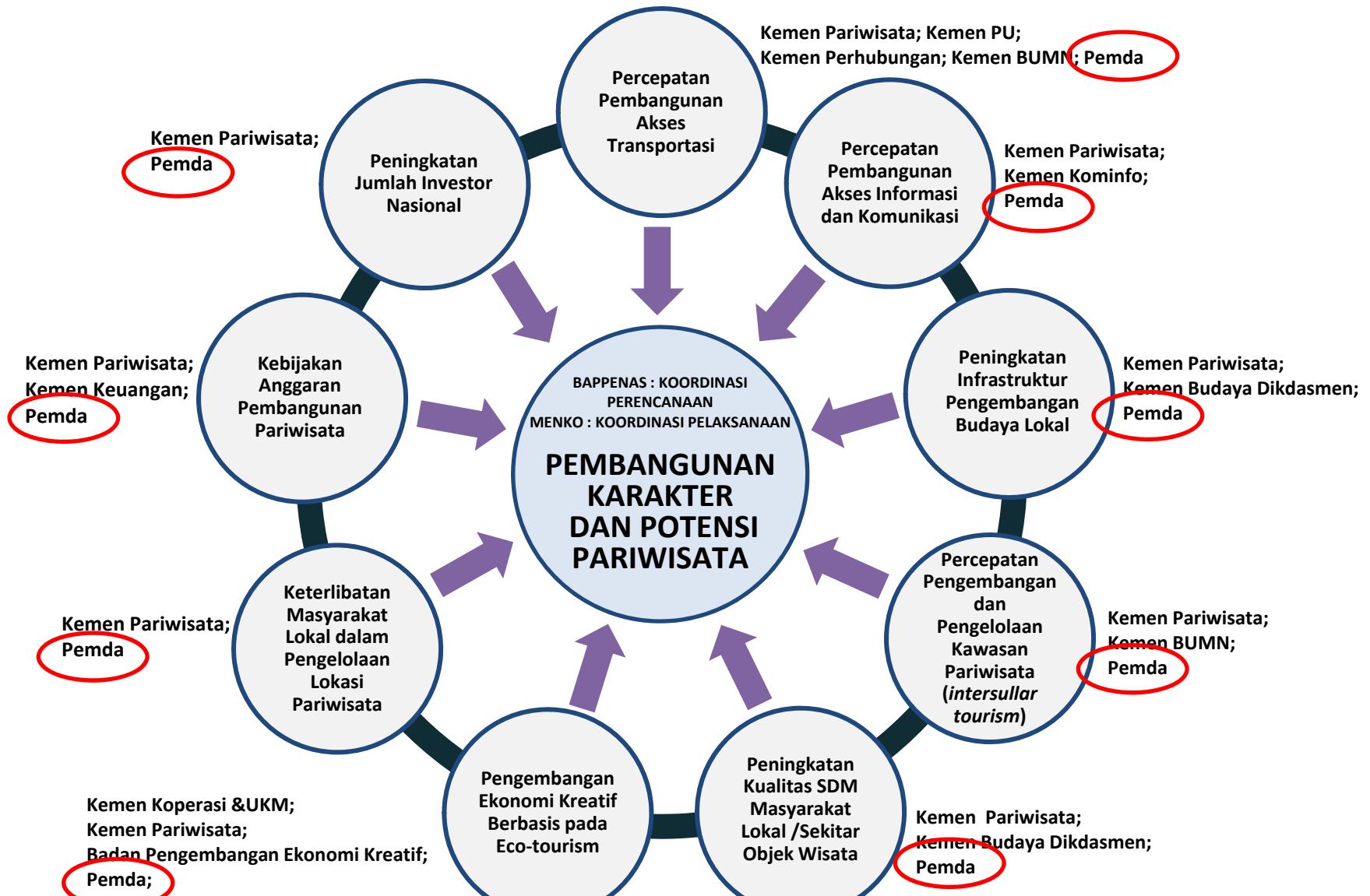
2. Kedaulatan Energi



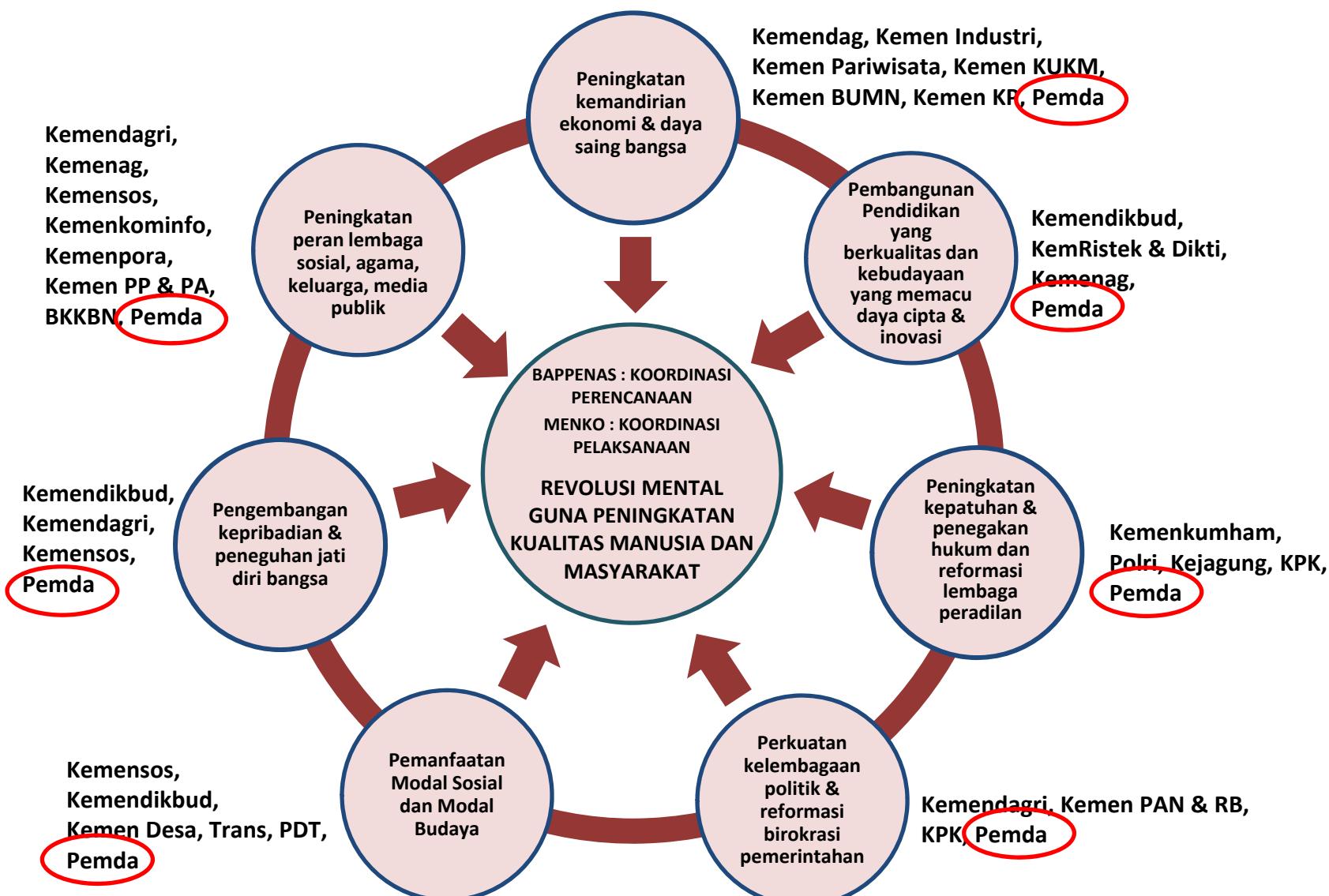
3. Kemaritiman



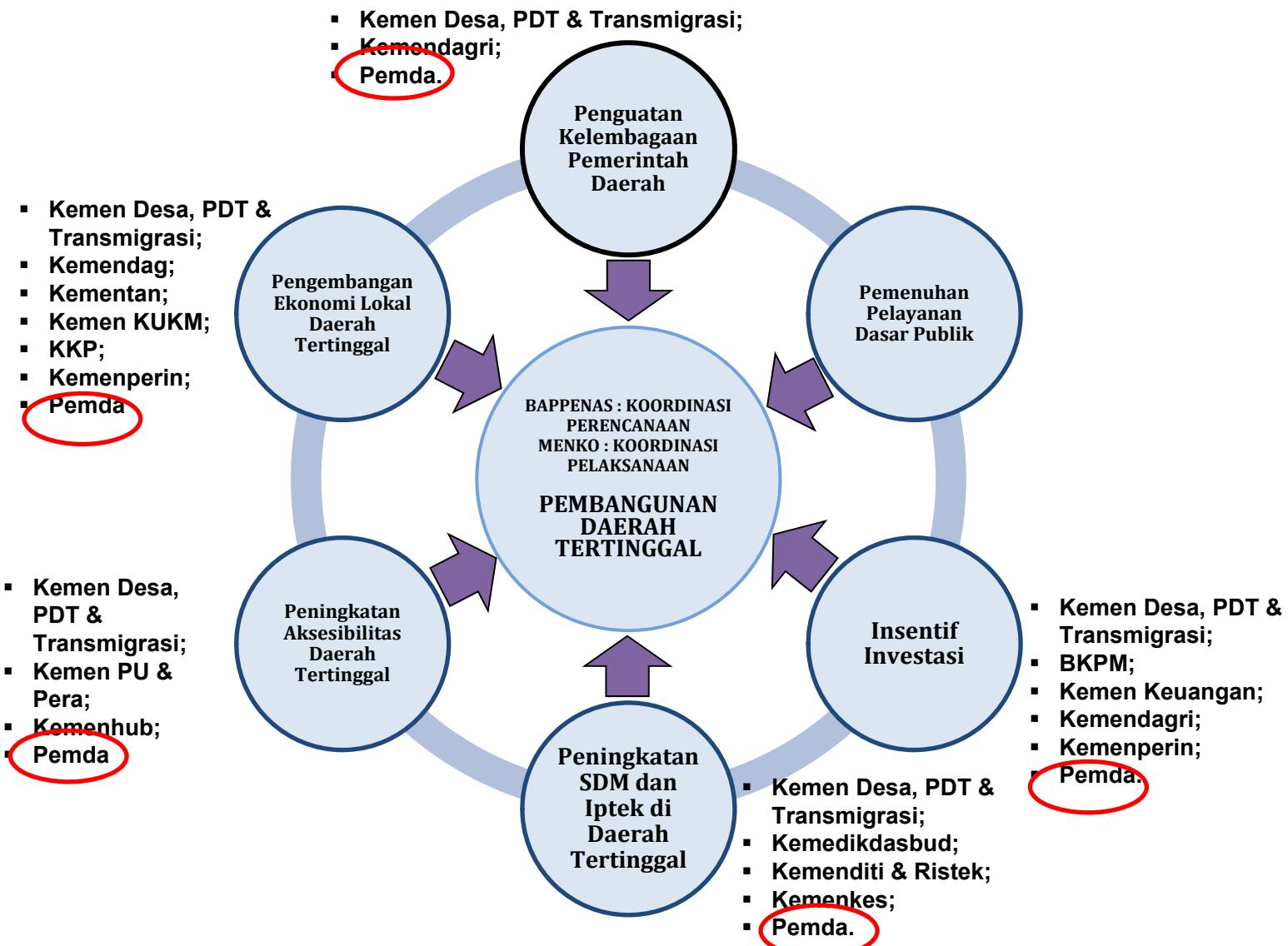
5. Pembangunan Karakter dan Potensi Pariwisata



6. Revolusi Mental



Pembangunan Daerah Tertinggal



A close-up photograph of a person's hands holding a white tablet. The tablet screen displays various blue-themed financial charts, including bar graphs and a pie chart. The background is blurred, showing more of the same type of charts.

Terima Kasih